

**ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
SIMALUNGUN DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR
MONEY* PERIODE TAHUN 2015-2017**

Oleh :

TRINIYATI

NIM.51144045

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Triniyati**
Nim. : 51144045
Tempat/tgl. Lahir : Sei Lapan, 03 September 1997
Alamat : Desa Rambungan Kec. Batang Kuis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PERIODE TAHUN 2015-2017”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan


TRINIYATI

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
SIMALUNGUN DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*
PERIODE TAHUN 2015-2017**


Oleh:

TRINIYATI
NIM. 51144045

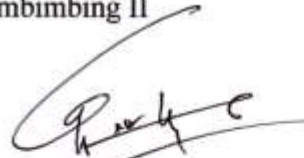
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah

Medan, 18 Oktober 2018

Pembimbing I



Dr. Isngini Harahap, MA
NIP.197507202003122002

Pembimbing II


Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB.1100000091

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003

Skripsi Berjudul “Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017” An. Triniyati, NIM 51144045 Program Studi Ekonomi Islam Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan Pada Tanggal 6 November 2018. Skripsi Ini Telah Diterima Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam,

Medan, 2 Desember 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

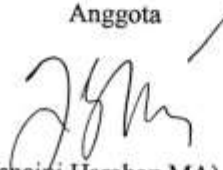
Ketua


(Dr. Marliyah, MA)

NIP 197601262003122003

Anggota

1.


(Dr. Ishajni Harahap, MA)
NIP.197507202003122002

3.



(Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.Hi.MA.)
NIP 197907012009122003

Sekretaris



(Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I)

NIP 199101292015032008

2.


(Aqwa Naser Daulay, M.Si)
NIB.1100000091

4.


(Annio Indah Lestari, SE, M.Si)
NIP 197403092011012003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




(Dr. Andri Soemtra, MA)
NIP.197605072006041002

ABSTRAK

Nama Triniyati, NIM : 51144045 dengan judul skripsi “ **Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017**” Pembimbing I **Dr.Isnaini Harahap,MA** dan Pembimbing II **Aqwa Naser Daulay, M.Si.**

Melalui evaluasi yang dianggarkan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan pelayanan di bidang pertanian, munculnya beberapa masalah dan keluhan ini mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Permasalahan yang terjadi pada dinas pertanian kabupaten simalungun yaitu seperti beralih fungsinya ribuan hektar lahan padi sawah menjadi lahan sawit dan ubi, dan belum diterapkannya teknik budidaya yang cocok dengan kondisi musim dan kebutuhan tanaman seperti racun hama. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dinas pertanian kabupaten simalungun dalam melaksanakan program/kegiatan. Maka adanya pengukuran kinerja dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun menggunakan metode *value for money* yang ditinjau dari elemen ekonomi, efisien, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan data skunder yang bersumber dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diolah menggunakan metode *value for money* yang berisi elemen ekonomi, efektif, dan efisien dalam mengukur kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Hasil dari penelitian ini yaitu ditinjau dari elemen ekonomi pengukuran ekonomi periode tahun 2015-2017 dinyatakan ekonomis, ditinjau dari elemen efisien periode tahun 2015 dan 2016 dinyatakan efisien, dan pada tahun 2017 dinyatakan efisien berimbang, ditinjau dari elemen efektivitas pengukuran kinerja periode tahun 2015-2017 dinyatakan efektif.

Kata Kunci : Kinerja, *Value For Money*, Ekonomis, Efisien, efektif

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Tak lupa kita panjatkan Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PERIODE TAHUN 2015-2017”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan progam S1 pada jurusan Ekonomi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya orang-orang hebat. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Katiok dan ibunda tercinta Suyatmi yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan yang tidak bisa dihitung besarnya serta doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dan menjadi sarjana seperti yang diinginkan.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Dr. Hj.Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr.Isnaini Harahap,MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis yang senantiasa meluangkan waktu demi memberikan banyak bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga layak untuk diselesaikan.
7. Seluruh Staf Pegawai Adm. Progam S1 Perbankan Syariah Universita Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama 4 tahun ini sebagai bekal dalam kehidupan ini.
9. Bapak Ir. Jan Posman H. Purba selaku Pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun beserta staf- staf nya yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian di Dinas tersebut.
10. Kepada keluarga penulis khususnya abangda Suyadi dan Dwi Praseftiyo dan juga kakak ipar Reza Aulia Putri S.Pd yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dalam mencapai gelar sarjana ini.
11. Kepada keluarga kedua penulis yaitu abangda M. Fizardian S.T. M.M dan kakak Andina Halimsyah Rambe. M.Pd, Siti Mutiah Ulfha S.E dan adinda Siti Lutfiah Rabiyyatul Adawiyah calon S.Pd yang tidak pernah bosan memberi semangat untuk penulis dan selalu memarahi penulis ketika penulis bermalasan.
12. Kepada sahabat Putong Squad yang hebat Yuriza Ahmad Gustina Munthe, SE , Mery Handayani Nst, SE , Yulihar Diyanti, SE , Nabilla Purba, SE , Tengku Savina Goldia, SE , Suhailah, SE, Mutiah Ulfha, SE yang selalu menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan dalam masa suka maupun duka yang telah banyak mengukir kenangan-kenangan indah bersama penulis.
13. Kepada lelaki yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis ketika penulis menyelesaikan yugas gelar sarjana ini.

14. Serta teman-teman tercinta mahasiswa EPS A Squad angkatan 2014 yang selama ini telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana Ekonomi Islam. Kalian yang TERBAIK!
15. Dan seluruh teman-teman penulis yang mungkin tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai referensi atau rujukan skripsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap masukan dan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 Oktober 2018

Penulis,

(TRINIYATI)

NIM. 51144045

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Kajian Teoritis	
1. Kinerja	
a. Pengertian Kinerja	8
b. Manajemen Berbasis Kinerja.....	9
c. Indikator Kinerja.....	10
d. Pengertian Pengukuran Kinerja	11
2. Sektor Publik	
a. Definisi Sektor Publik.....	14
b. Kinerja Sektor Publik.....	15
3. <i>Value For Money</i>	
a. Pengertian <i>Value For Money</i>	17

b. Indikator <i>Value For Money</i>	20
c. Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i>	21
d. Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i>	21
e. Langkah-Langkah Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i>	22
4. Standar pelayanan minimal (SPM).....	27
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik	28
B. Kajian Terdahulu	39
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Penelitian.....	35
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data	36
5. Jenis Dan Sumber Data.....	36
6. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	39
A. Hasil penelitian	
1. Data umum	39
2. Data khusus	45
B. Hasil Penelitian	45
1. Pengukuran Ekonomi	45
2. Pengukuran Efisien	57
3. Pengukuran efektivitas	66
C. Pembahasan Penelitian	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... //

A. Kesimpulan 77

B. Saran 77

Daftar Pustaka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1 Pengukuran Ekonomi Tahun 2015	46
Tabel 4.2 Tingkat Ekonomi Tahun 2015	49
Tabel 4.3 Pengukuran Ekonomi Tahun 2016	49
Tabel 4.4 Tingkat Ekonomi Tahun 2016.....	52
Tabel 4.5 Pengukuran Ekonomi Tahun 2017	53
Tabel 4.6 Tingkat Ekonomi Tahun 2017	56
Tabel 4.7 Pengukuran Efisien Tahun 2015	57
Tabel 4.8 Tingkat Efisien Tahun 2015	59
Tabel 4.9 Pengukuran Efisien Tahun 2016	60
Tabel 4.10 Tingkat Efisien Tahun 2016.....	62
Tabel 4.11 Pengukuran Efisien Tahun 2017	63
Tabel 4.12 Tingkat Efisien Tahun 2017	65
Tabel 4.13 Pengukuran Efektif Tahun 2015.....	67
Tabel 4.14 Tingkat Efektif Tahun 2015	69
Tabel 4.15 Pengukuran Efektif Tahun 2016.....	69
Tabel 4.16 Tingkat Efektif tahun 2016.....	71
Tabel 4.17 Pengukuran Efektif Tahun 2017.....	72
Tabel 4.18 Tingkat Efektif Tahun 2017	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1 Siklus Pengukuran Kinerja	13
Gambar 2.2 Konsep <i>Value For Money</i>	18
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tentang tingkat keberhasilan organisasi. Adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program.

Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan.¹ Diantaranya banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Kenyataan ini menyadarkan semua perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Sektor publik atau pelayanan publik yang ada dimasyarakat dinilai sebagai sarang inefisiensi, penurunan anggaran secara signifikan dari Pagu anggaran Pemerintah serta diikuti oleh penurunan realisasi anggaran yang dilaksanakan pada sector publik sering terjadi sehingga dianggap sebagai instansi yang selalu mengalami kerugian.²

Dalam menjalankan aktivitas kegiatan atau pelaksanaan programnya, sektor publik atau pelayanan publik lebih memperhatikan kinerjanya. Pentingnya kinerja dalam pelayanan publik sebagai tolak ukur dari tingkat keberhasilan dari

¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar* (Jakarta, Erlangga,2006) h.232.

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Public* (Yogyakarta, Andi,2002), h.4.

pelayanan publik itu sendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Jika tidak diperhatikan kinerja yang ada di dalam pelayanan publik maka tidak akan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dari organisasi sektor publik. Dimana dalam menentukan tingkat keberhasilan sektor publik tidak hanya melihat capaian pelaksanaan tetapi juga penilaian masyarakat yang dirasakan langsung terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan publik.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya sistem manajemen kinerja sektor publik (pemerintah) yang baik dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang akhirnya akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berbagai tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat diharapkan mampu direalisasikan pemerintah atas program-program kerjanya. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggung jawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional-nya (APBN), baik dari sisi kinerja maupun dari sisi keuangan.

Hasil pengukuran kinerja sektor public harus dilaporkan dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik.³ Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk

³Mahmudi, *Menejemen Kinerja Sektor Public Edisi Revisi* (Yogyakarta, UPT SYIM YKPN, 2007) h:7

mengukur kinerja organisasi sector publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Dalam rangka mencapai hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek *tangible* dan *intangibile* maka metode pengukuran harus didesain sedemikian rupa agar bias representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat pengukuran kinerja, antara lain menggunakan *balance score card* dan *value for money*. Dalam metode *balance score card* yang didalamnya terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*consumer*), perspektif bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan *value for money* terdapat tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja organisasi sector public karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sector publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama : 1) ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. 2) efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. 3) efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.⁴

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan kekhasan dan kondisi alam yang ada, Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan potensi sumber daya dalam hal pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun selaku organisasi sektor publik yang menangani masalah pertanian di Simalungun telah menetapkan program-program untuk mendukung perkembangan pertanian tersebut.

⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Public*, h.4

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas pertanian Simalungun belum dapat bekerja secara maksimal karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi dan masih banyak keluhan yang disampaikan para petani Kabupaten Simalungun. Misalnya seperti salah satu artikel dari hetanews.com yang menyebutkan bahwa harga tomat mahal, saat petani terancam gagal panen. Hal ini disebabkan karena belum diterapkan teknik budidaya yang cocok dengan kondisi musim dan kebutuhan tanaman seperti racun hama.

Masalah lainnya seperti ribuan hektar lahan padi sawah di Kecamatan Tanah Jawa dan Huta Bayu beralih fungsi menjadi sawit dan ubi yang diakibatkan kurangnya pemerataan perairan di daerah tersebut, artikel hetanews.com (2018) keluhan-keluhan lain dari para petani Simalungun ini meliputi masalah pembagian pupuk yang tidak merata, bibit jagung dari pemerintah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan masih banyak keluhan lainnya.

Berdasarkan tujuan Dinas Pertanian Simalungun yang memberikan pelayanan di bidang pertanian, munculnya beberapa masalah dan keluhan ini mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian Simalungun belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Kinerja Dinas Pertanian Simalungun sering dinilai hanya dari aspek *input* dan *output*. Instansi ini cukup berhasil jika bias menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*). Oleh karena itu diperlukan ukuran non-finansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun menggunakan metode *value for money*.

Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dengan Pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun priode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen ekonomi?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun priode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun priode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen efektivitas?

C. Batasan Istilah

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sektor Publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Dalam kerangka pemahaman sektor publik maka barang publik yang dimaksud tidak hanya berupa dalam bentuk barang secara fisik namun juga mengandung makna non fisik yaitu pelayanan publik.

Value For Money adalah sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *input*. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi, merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (*input*) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai *input*).

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Ada pengertian yang hampir serupa antara efisien dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah.

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen ekonomi.
- b. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen efisiensi.
- c. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode tahun 2015-2016 ditinjau dari elemen efektivitas.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai tambahan koleksi bacaan dan referensi mengenai organisasi sektor publik dan *value for money*.

b. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun untuk memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan bahan kajian pustaka untuk pihak lain, untuk meneliti di masa mendatang serta menambah wawasan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.⁵

Kemampuan seseorang merupakan ukuran pertama meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dari hasil kerjanya. Artinya, mampu atau tidaknya seseorang melaksanakan pekerjaannya yang akan menentukan kinerjanya. Selanjutnya kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya, secara teori dikatakan bahwa kinerja juga perlu didukung oleh motivasi yang kuat agar kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan.⁶

Hal lain yang perlu diperhatikan selain faktor kemampuan dan motivasi adalah faktor kesempatan yang dimiliki. Artinya adanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Robin mengatakan bahwa harus ada kombinasi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan akan menentukan hasil yang akan dicapai seseorang.⁷

Dalam praktiknya kinerja dibagi ke dalam dua jenis yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah kinerja yang dihasilkan oleh seseorang, sedangkan kinerja organisasi adalah kinerja

⁵Suyadi Prawirosentono Dan Dewi Primasari, *Kinerja Dan Motivasi Karyawan* (Yogyakarta: BPFE Cetakan Kedua), 2017 h. 2.

⁶Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet 4, 2014) h. 127.

⁷*Ibid.*

perusahaan secara keseluruhan. Namun kinerja karyawan yang merupakan kinerja individu yang akan mendukung kinerja organisasi.⁸

Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁹

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.

Kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seseorang karyawan akan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu.¹⁰

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam islam seorang pimpinan sebuah organisasi tidak boleh memberikan beban kerja melebihi kemampuan yang ada dalam diri seorang pegawai. Hal ini disebutkan dalam hadis Abu Dzar radiallahu ‘anhu Nabi SAW bersabda:

⁸Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2016, h.182.

⁹Department Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro) 2010

¹⁰Multitama, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*, (Jakarta,:Zikrul Hakim), 2006, h. 200.

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya:“Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian membebani tugas kepada mereka, bantulah mereka.” (HR. Bukhari no.30)¹¹

Pada hadis ini diketahui bahwa Rasulullah Saw memerintahkan agar mrmberikan beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan pekerja dan melarang atasan untuk mebebaninya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dilakukannya, dan juga seorang atasan dianjurkan untuk meringankan pekerja karena hal tersebut dapat menjadi amal kebajikan bagi atasan di hari kiamat.¹²

b. Manajemen Berbasis Kinerja

Manajemen berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan Organisasi Sektor Publik dalam mencapai hasil atau *outcome* yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan *stakeholder* lainnya. Manajemen kinerja adalah proses yang sistematis, artinya untuk memperbaiki kinerja diperlukan langkah-langkah atau tahap-tahap yang terencana dengan baik.¹³

Proses perbaikan kinerja bukan merupakan kinerja jangka pendek, melainkan merupakan proses evolutif yang berjangka panjang. Manajemen berbasis kinerja tersebut pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan budaya kinerja. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategis, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja.¹⁴

¹¹ Isnaini Harahap, *et. al. hadis hadis ekonomi* (Medan:Wal Asri Publishing, 2015). h.30

¹²*Ibid.*, h.32

¹³ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service, 2018), h. 98.

¹⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.4-5.

c. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dikonsepsikan sebagai sasaran kerja yang terukur pada suatu tahun program kegiatan pada setiap instansi pemerintah. Kinerja dimaknakan sebagai hasil kerja yang berbentuk *output* dan *outcome* dan bukan tampilan kerja. Istilah indikator kinerja yang digunakan oleh Menpan dalam konsepsi ilmiah yang disebutkan diatas mempunyai kesamaan konsepsi indikator hasil kerja (*result indicators*). Indikator utama dalam konsepsi Menpan bukan indikator terpenting dari sekian banyak indikator kinerja, tetapi merujuk pada hal terpenting yang terkait dengan misi Instansi Pemerintah, dan bersifat umum, dan bernilai strategis.¹⁵

Semua Direktorat yang terdapat pada setiap Instansi Pemerintah diharuskan menerjemahkan indikator kinerja strategis tersebut menjadi indikator kinerja operasional. Bila indikator kinerja utama dikembangkan dan ditetapkan pada tingkat kementerian untuk sasaran strategis, indikator kinerja khusus ditetapkan oleh Direktorat sebagai sasaran operasional.¹⁶

Penggunaan indikator kinerja utama dan indikator kinerja khusus dengan konsep seperti yang digunakan di sebuah Departemen banyak ditemukan di sejumlah perusahaan atau Organisasi pada sistem perencanaan program kerjanya. Ini adalah makna ekstensi dari konsep aslinya yang asalnya bermakna penanda yang bersifat harian, umum, dan menyimpan sejumlah indikator khusus. Melalui indikator ketercapaian yang biasanya dinyatakan pada hitungan tahun untuk pembangunan perusahaan atau Organisasi dalam jangka menengah atau jangka panjang cukup efektif untuk mengetahui sejauh mana sebuah program kerja dapat berjalan secara efektif.¹⁷

d. Pengertian Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui

¹⁵ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014) h. 120.

¹⁶*Ibid.*, h. 121.

¹⁷Mohammad Faisal Amir, *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2015), h. 136.

alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian Organisasi.¹⁸

Sistem pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang.

1) Perencanaan strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang ditujukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktifitas tertentu.

2) Penyusunan program

Penyusunan program (*programming*) adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan Organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut.¹⁹

Tujuan pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik Organisasi Sektor Publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah:²⁰

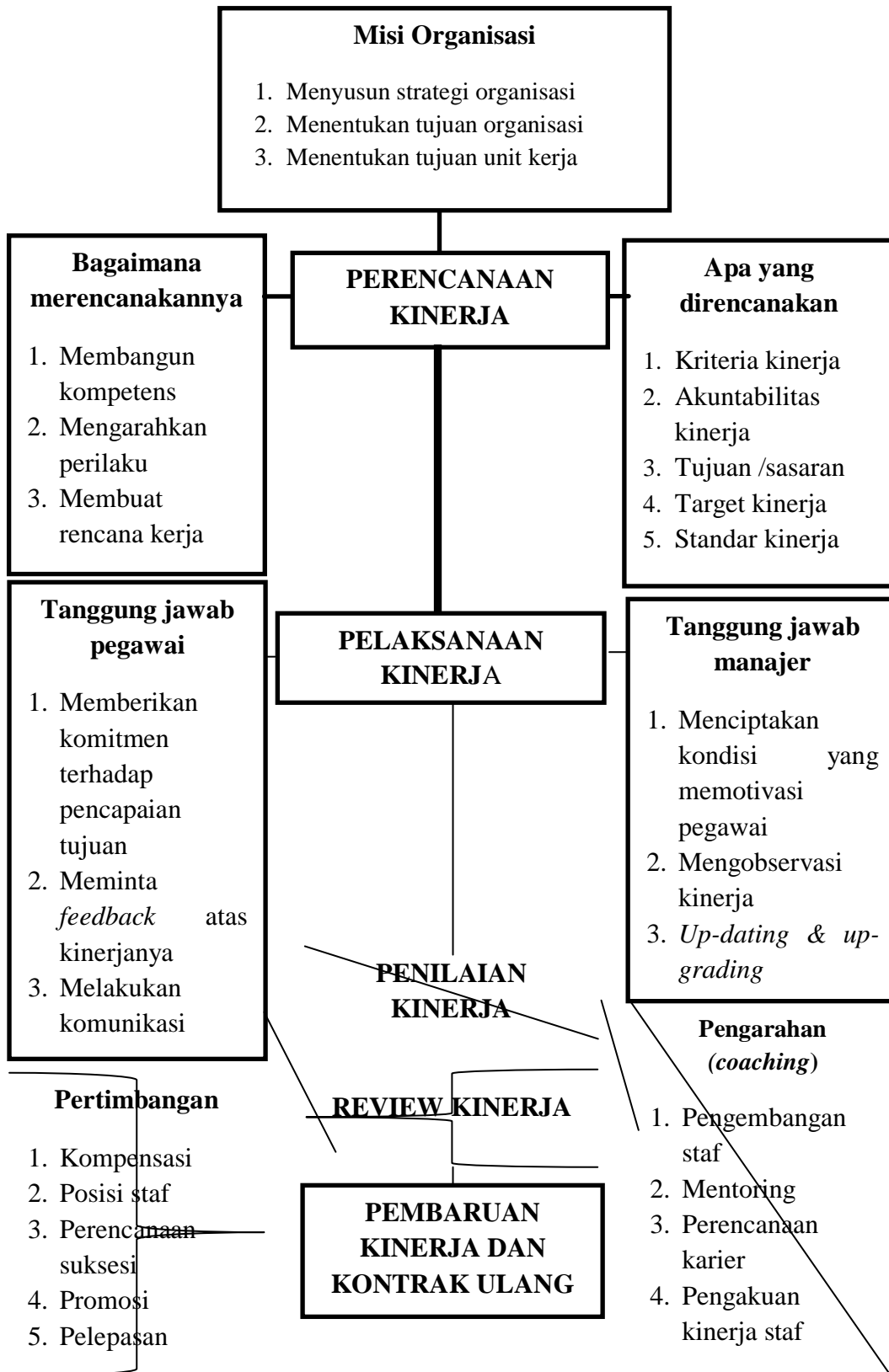
- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 4-5.

¹⁹ *Ibid.*, h. 119-120.

²⁰ Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.142.

Gambar 2.1 :Siklus Pengukuran Kinerja
Siklus Pengukuran Kinerja



2. Sektor Publik

a. Defenisi Sektor Publik

Menurut mahsun, bahwa sektor publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Dalam kerangka pemahaman sektor publik maka barang publik yang dimaksud tidak hanya berupa dalam bentuk barang secara fisik namun juga mengandung makna non fisik yaitu pelayanan publik. Dari berbagai literatur, barang publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Barang publik murni, contohnya : pertahanan nasional dan layanan pemadam kebakaran, dimana pengadaan barang publik murni ini dibiayai dari pajak. Dengan begitu terdapat empat karakteristik barang publik murni, sebagai berikut :
 - a) *Non rivalry in consumption*, maksudnya barang publik merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya.
 - b) *Non exclusive*, maksudnya penyediaan barang publik tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang eksklusif antar individu dalam masyarakat, semua orang memiliki hak yang sama untuk mengkonsumsinya.
 - c) *Low excludability*, maksudnya penyedia atau konsumen suatu barang tidak bisa menghalangi atau mengecualikan orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.
 - d) *Low competitive*, maksudnya antar penyedia barang publik tidak saling bersaing secara ketat, hal ini karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.
- 2) Barang semi publik atau biasa juga disebut *common pool goods*, yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang

manfaat barang atau jasa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini sebetulnya mempunyai daya saing yang tinggi tetapi *non excludable*, maksudnya penyedia atau konsumen barang atau pelayanan publik ini tidak bisa menghalangi/mengecualikan orang lain untuk menggunakan serta memperoleh manfaat dari barang tersebut, meskipun konsumsi seseorang akan mengurangi keberadaan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan barang atau jasa semi publik ini sebagian dapat dibiayai oleh sektor publik dan sebagian lainnya dibiayai oleh sektor privat.²¹

b. Kinerja Sektor Publik

Kinerja sektor publik adalah output atau keluaran kerja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik. Demikian itu juga terdapat kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan, kontrol untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap pelayanan yang diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, serta sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik. Baik atau buruknya penilaian terhadap pelayanan publik tergantung sejauh mana pelayanan tersebut diberikan.²²

Pada organisasi sektor publik, publik atau masyarakat merupakan pelanggan. Memuaskan kebutuhan masyarakat berarti memberi kepuasan kepada pelanggan. Untuk mencapai kepuasan masyarakat diperlukan perhatian terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan kebutuhan

²¹ Moh. Mahsun. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta: BPFE, 2006, ed 1) h. 52.

²² Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 57.

masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 181-183.

Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Artinya :(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. (182). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;²³

Peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dalam kepuasan pelanggan atas produk atau layanan jasa yang diberikan menjadi potensi pendapatan perusahaan. Pelanggan yang puas akan kembali menggunakan produk atau jasa perusahaan. Selain itu juga, pelanggan yang puas juga dapat menjadi sarana promosi yang efektif karena pelanggan tersebut biasanya akan merekomendasikan produk atau jasa yang digunakannya. Pada akhirnya, pendapatan yang diperoleh dari pelanggan harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan kinerja keuangan yang optimal.

Kepuasan pelanggan menilai tingkat kepuasan atas kriteria kinerja tertentu didalam proposisi nilai. Profitabilitas pelanggan mengukur keuntungan bersih yang diperoleh pelanggan atau segmen tertentu setelah dihitung berbagai pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.²⁴

²³ Departmen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,

²⁴ Nurhalisah Mursidin. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Ditinjau Dari Perspektif Balanced Scorecard*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 24.

3. *Value For Money*

a. *Pengertian Value For Money*

Sebelum membahas mengenai *Value for Money*, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kinerja. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Moh Mahsun kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.²⁵

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau organisasi dihubungkan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi.²⁶

Menurut Robertson, pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja

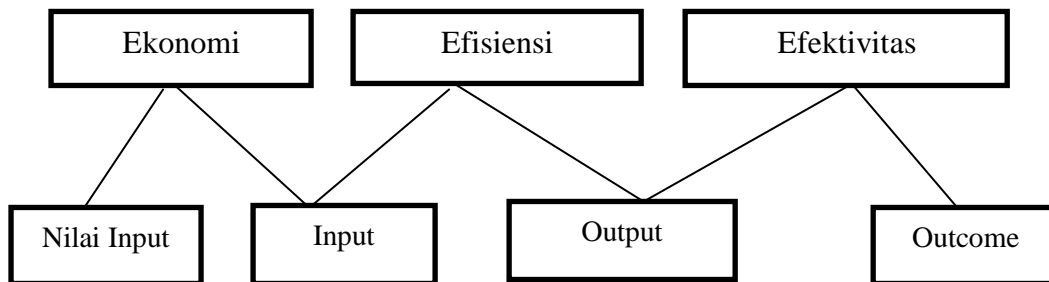
²⁵ Moh. Mahsun. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h. 54.

²⁶ Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE, 2006), h.274.

merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.²⁷

Value for Money menurut Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara skematis.²⁸

Value for Money dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Konsep *Value for Money*

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang in-efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntuan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.²⁹

Selaras dengan pendapat Deddi Nordiawan dalam bukunya, yang menyatakan bahwa *value for money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.³⁰

²⁷Moh. Mahsun. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h. 26.

²⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hal. 4.

²⁹*Ibid.*, hal. 5.

³⁰Deddi Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 78.

Value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata *value* dan *money*, konsep *value for money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *time value for money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value for money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.³¹

Kinerja keuangan merupakan penggambaran keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya, penilaian kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

1. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *input*. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi, merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (*input*) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai *input*).
2. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Ada pengertian yang hampir serupa antara efisien dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah.

³¹Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hal. 83.

3. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.³²

b. Indikator *Value For Money*

Tuntutan masyarakat dalam *Value for Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator *Value for Money* terbagi menjadi dua, yaitu:³³

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

c. Manfaat Implementasi *Value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi

³²Isna Ardila, *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value FOR Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*, (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan, 2015), h. 6.

³³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002) hal. 130.

organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran. Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antarlain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.³⁴

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

d. Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Untuk mendongkrak kinerja sektor publik, diperlukan manajemen kinerja sektor publik tersebut harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerjanya *value for money* merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Rantai *value for money* memiliki 3 elemen utama, yaitu *input-output-outcome*. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur

³⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h.7.

tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Namun pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tidak dapat langsung dilakukan karena untuk mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas diperlukan pengembangan indikator kinerja (IK) dalam desain sistem pengukuran kinerja Organisasi.³⁵

e. Langkah-Langkah Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Manajemen kinerja terintegrasi terdiri atas dua bagian utama yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap, yaitu:

- 1) Penentuan visi, misi, dan tujuan (*goal*), serta strategi;
- 2) Penerjemahan visi, misi, dan tujuan (*goal*), serta strategi ke dalam:
 - a) Sasaran strategik;
 - b) Inisiatif strategik ;
- 3) Indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*);
- 4) Target kinerja.

Sementara itu, kerangka pengukuran kinerja *value for money* dibangun atas tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Komponen misi, visi, tujuan sasaran, dan target;
- 2) Komponen *input*, proses, *output*, dan *outcome*;
- 3) Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.³⁶

1) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengukuran ekonomi adalah:

- a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?

³⁵Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h. 89.

³⁶*Ibid.*, h. 91.

- b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?³⁷

Ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran.³⁸ Biaya pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* sesuai dengan yang ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:³⁹

Rasio Ekonomi = target anggaran – realisasi anggaran

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan program dan aktivitas. Input tersebut dapat berupa kas, bahan baku, infrastruktur dan masukan lainnya. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan input adalah realisasi anggaran, dimana realisasi anggaran merupakan sejumlah dana yang diterima oleh organisasi yang kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan organisasi.⁴⁰

Nilai input merupakan sejumlah dana yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kepentingan organisasinya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nilai input adalah target anggaran. Target anggaran merupakan perencanaan keuangan

³⁷Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, h.133.

³⁸*Ibid.*, h. 4.

³⁹Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h. 280.

⁴⁰Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, h. 5.

untuk masa depan yang pada umumnya mencakup waktu selama satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.⁴¹

Berikut adalah kriteria kinerja sektor publik dikatakan ekonomi:⁴²

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi, merumuskan efisiensi sebagai berikut⁴³:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100$$

Keterangan:

Output : presentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Input : presentasi nilai ekonomi

Output merupakan hasil yang diperoleh dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Dalam penelitian yang dimaksud dengan *output* adalah presentase hasil yang diperoleh dari satu kegiatan. *Input* yang akan dibandingkan dengan *output* untuk menentukan tingkat efisiensi adalah presentase nilai ekonomi, yaitu hasil yang diperoleh atas perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-

⁴¹Moh. Mahsun, *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h.145.

⁴²*Ibid.*, h.186.

⁴³Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h. 80.

rendahnya (*spending well*). Kinerja organisasi dapat dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dari inputnya.⁴⁴

Berikut adalah kriteria kinerja sektor publik dikatakan efisien:⁴⁵

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efisien
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efisien

Pengukuran efisiensi tidak bersifat absolute tetapi bersifat relative karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan:

- a) Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
- b) Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- c) Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama.
- d) Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*⁴⁶

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi secara matematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

⁴⁴*Ibid.*, h. 81.

⁴⁵Moh. Mahsun, *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h. 187.

⁴⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 9.

Keterangan :

Outcome : presentase dampak yang ditimbulkan dari satu kegiatan

Output : presentasi hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Outcome merupakan presentase dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program yang dilakukan oleh organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan efektivitas apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Berikut adalah pengukuran kinerja sektor publik dikatakan efektif.⁴⁸

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.⁴⁹

4. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Desain sistem manajemen kinerja sektor publik tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik. Manajemen kinerja sektor publik belum lengkap apabila tidak memiliki ketetapan standar pelayanan publik yang menjadi acuan bagi manajemen dalam bertindak.

Standar pelayanan publik merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dalam rangka memenuhi

⁴⁷Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h. 84.

⁴⁸Moh. Mahsun, *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h. 187.

⁴⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 134.

standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan standar pelayanan minimal.

Aturan lebih rinci standar pelayanan minimal ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Sesuai tentang peraturan Pemerintah tersebut, standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan minimal yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, standar pelayanan minimal merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Diberlakukan untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota. Standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;

- d. Merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- e. Bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;
- f. Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.⁵⁰

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik (LAKIP)

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah yang merupakan realisasi hasil kegiatan dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat

⁵⁰https://repository.usd.ac.id/6090/2/122114145_full.f Diakses pada tanggal 21 Februari 2018

penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.⁵¹

B. Kajian Terdahulu

1. Demi Aulia Arfan (2014), yang berjudul “Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Priode Tahun 2011-2012”

Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian daerah istimewa yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Penelitian Demi Aulia Arfan bertujuan untuk menilai kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari metode ini adalah data mengenai rencana dan realisasi program pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dokumen sumber yang digunakan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2012.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa kinerja Dinas Peranian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tiga program yang dianalisis yaitu peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan kethanan pangan, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian menunjukkan bahwa: 1) Dari elemen ekonomi dapat diketahui bahwa pada priode 2011-2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan program secara ekonomis. 2) Dari elemen efisien dapat dapat diketahui priode 2011-2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh program secara efisiensi. 3) Dari elemen efektivitas priode tahun 2011 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan 2 program secara efektif, dan 1 program

⁵¹<https://indrasufian.wordpress.com/2009/01/26/lakip>, diakses pada tanggal 20 april 2018

kurang efektif. Sedangkan periode tahun 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan program secara efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis *Value for Money*. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang mengambil pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk penelitian yang sekarang mengambil tempat pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.⁵²

2. Dian Anisa (2011), yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*”.

Penelitian Dian Anisa bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar, melalui pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Penelitian ini menunjukkan tingkat ekonomi dan efisiensi Dinas Kesehatan Kota Makassar mampu mencapai hasil yang cukup baik. Tetapi, tingkat efektivitasnya masih kurang karena didasari tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal. Penelitian Dian Anisa menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu

- 1) wawancara untuk mengetahui tingkat kinerja dari aspek ekonomi;
- 2) dokumentasi untuk mengetahui tingkat kinerja dari aspek efisiensi;
- 3) kuesioner dengan sampel 100 orang untuk mengetahui tingkat kinerja dari aspek efektivitas.⁵³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dian Anisa (2011) yaitu sama-sama meneliti kinerja organisasi sektor publik menggunakan analisis *Value for Money*, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan metode pengumpulan data. Penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar dan menggunakan tiga metode pengumpulan data, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor

⁵²Demi Aulia Arfan, “*Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 90-91.

⁵³Annisa, Dian, “*Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2011), h. 60.

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan hanya menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

3. Taufik Kurrohman (2012), yang berjudul “*Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*”.

Penelitian Taufik Kurrohman (2012) dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja menggunakan metode *Value for Money*. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD atas 25 kabupaten dan 6 kota yang berturut padatahun 2004-2006 dan 2008-2010 menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan efisien, tetapi tidak ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif. Penelitian Taufik Kurrohman menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan populasinya yaitu ringkasan realisasi APBD dan ringkasan anggaran APBD kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah ringkasan realisasi APBD dan ringkasan APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota pada tahun 2004-2006 (sebelum penerapan penganggaran berbasis kinerja) dan pada tahun 2008-2010 (setelah penerapan penganggaran berbasis kinerja).⁵⁴

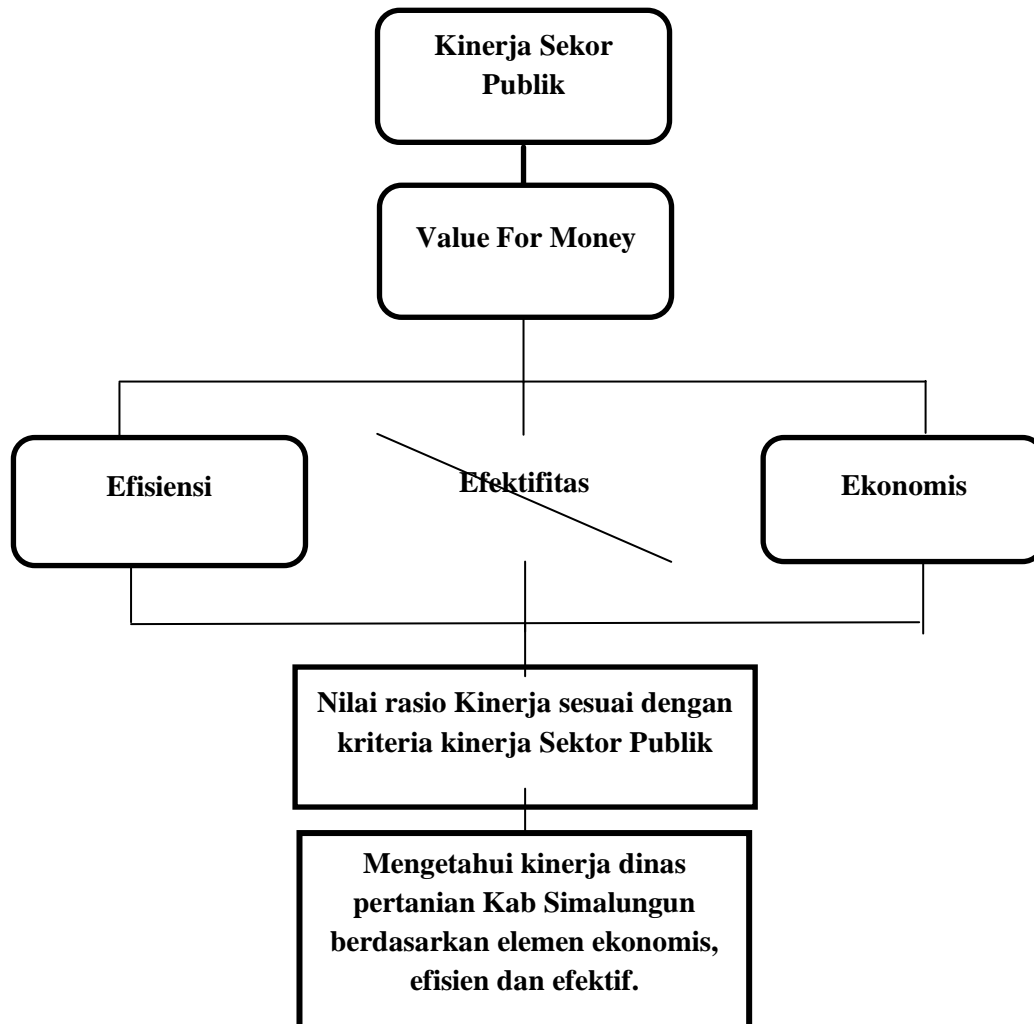
Persamaan penelitian Taufik Kurrohman dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kinerja organisasi sektor publik menggunakan analisis *Value for Money*. Untuk perbedaan terletak pada metode analisis data dan objek penelitian. Penelitian Taufik Kurrohman menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pada kabupaten dan kota

⁵⁴Taufik Kurrohman, “*Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Jawa Timur*” (Jurnal, Universitas Jember: 2007), h.7-9.

di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan dilakukan pada Kantor Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran



Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor public dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisien merupakan perbandingan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ini sebagai salah satu organisasi sektor publik yang membidangi masalah pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun ini juga memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam menjalankan program kerjanya kinerja di dalam Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ini sering dinilai hanya dari output dan input. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Oleh karena itu diperlukan ukuran non-finansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Maka *output*, *outcome*, *nilai input*, dan *input* di atas untuk menghitung dan mengukur kinerja sektor publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun melalui pendekatan *value for money* yaitu menilai kinerja dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi saat ini, yaitu untuk mengetahui kinerja sektor publik dengan pendekatan *value for money* pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Di Kompleks Perkantoran SKPD Pematang Raya Kec. Raya Kab. Simalungun.

Waktu penelitian ini yaitu dimulai pada tanggal 2 September 2018 – 2 Oktober 2018.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala sub bagian administrasi data dan pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, obyek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri

⁵⁵Restu Kartiko Widi. *Asas Metode Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), h. 84.

dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis⁵⁶

Objek dalam penelitian ini adalah data pencapaian realisasi keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode 2015-2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang di dapat dari metode ini adalah data mengenai laporan rencana dan realisasi anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

5. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data kualitatif deskriptif yaitu data yang didapat dengan menggunakan angka dan yang diperoleh dari bagian keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang bersangkutan yang memerlukannya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh penulis sendiri untuk tujuan lain, Artinya penulis adalah tangan kedua yang sekedar mencatat, mengakses dan meminta data

⁵⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 199.

tersebut (dimana data terkadang sudah berwujud informasi) ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan⁵⁷

6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif.⁵⁸

Penelitian ini akan mengukur kinerja sektor publik Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Menggunakan pendekatan *value for money* di dalam pendekatan tersebut terdapat tiga elemen yang ingin diteliti oleh penulis. Yaitu, dengan pengukuran ekonomi, efektif, dan efisien. Berikut ini teknik analisis data yang ingin digunakan pada masing- masing elemen yaitu:

- a Ekonomi, merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (input) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai input). Ekonomi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \text{target anggaran} - \text{realisasi anggaran}$$

Suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila *input* lebih kecil dari nilai input dan dapat mencapai output sesuai dengan yang ditetapkan.

- b Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu (input) atau penggunaan masukan terendah. Efisien dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

⁵⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) , h. 102.

⁵⁸Arfan Ikhsan dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung: Cipta Pustaka, 2014), h. 25.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100$$

Suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila keluaran (*output*) yang dihasilkan mencapai target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber daya (*input*) yang telah digunakan.

- c Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan *output*. Efektif dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Suatu kinerja dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1) Data Umum

a. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun merupakan salah satu organisasi sektor publik yang mengrusi atau membidangi sektor pertanian di Daerah Kabupaten Simalungun. Secara geografis Kabupaten Simalungun terletak di Propinsi Sumatera Utara pada garis 02°36' - 03°18' Lintang Utara dan 98°32' - 99°35' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar. Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah : 4.372,50 km² dari wilayah propinsi Sumatera Utara terdiri dari : 31 Kecamatan, 27 kelurahan dan 386 Desa/Nagori dengan ketinggian wilayah antara 0 – 1.400 mdpl. Kabupaten Simalungun memiliki potensi lahan sawah : 43.896 Ha.

Besarnya potensi lahan sawah yang dimiliki menempatkan kabupaten Simalungun sebagai penghasil beras sekaligus lumbung beras terbesar di Sumatera Utara. Disamping lahan sawah diatas juga mempunyai lahan kering yang subur seluas: 394.764 Ha yang berpotensi dalam pengembangan tanaman padi gogo, palawija, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Pembangunan Pertanian di Kabupaten Simalungun mempunyai arti cukup besar dan strategis dimana jumlah penduduk Kabupaten Simalungun 70,66% menggantungkan hidupnya disektor Pertanian.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

adanya perubahan mendasar terhadap Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2008, tentang uraian jabatan dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 2) Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- 4) Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- 5) Pelaksana tugas – tugas yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Visi Dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun

Dengan mencermati gambaran keadaan saat ini, danantisipasi serta adaptasi terhadap perkembangan yang dinamis maka untuk memperoleh keadaan yang diinginkan untuk masa yang akan datang, Dinas Pertanian harus menetapkan Visi dan Misinya terlebih dahulu. Visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura akan diarahkan. Sedangkan Misi merupakan gambaran hal-hal yang harus dilaksanakan untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah :

“Terwujudnya Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Petani yang Sejahtera”

Visi tersebut diatas mengandung batasan dan makna sebagai berikut :

- 1) Pertanian, dalam hal ini dibatasi pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, yang merupakan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
- 2) Tangguh, memiliki pengertian terwujudnya suatu keadaan yaitu :
 - a) Petani beserta organisasinya, sebagai pelaku usaha tani mampu melakukan segala hal dalam usaha taninya dalam kondisi baik maupun buruk, mampu mengatasi segala situasi dan mandiri
 - b) Aparat, instansi/lembaga dan stakeholder lainnya yang berperan dalam mendukung usaha tani mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberhasilkan proses pembangunan pertanian
 - c) Produk usaha tani yang dihasilkan memiliki daya saing, mampu menghadapi persaingan global (kuantitas, kualitas maupun harga) baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun skala internasional.
 - d) Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk usaha tani guna memperoleh pendapatan yang lebih baik
- 3) Berkelanjutan (sustainable), memiliki pengertian terwujudnya suatu keadaan dimana proses usaha tani dapat berlangsung terus menerus dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimum dengan tetap memelihara kelestariannya.
- 4) Masyarakat Petani yang Sejahtera, memiliki pengertian terwujudnya peningkatan income/pendapatan perkapita secara signifikan, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dan dapat menyisakan penghasilannya untuk tabungan jaminan masa depan.

Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh Visi tersebut, maka Dinas Pertanian menetapkan beberapa Misi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan aparatur serta penguatan kelembagaan dibidang pertanian
- 2) Mengoptimalkan daya dukung potensi sumber daya alam pertanian
- 3) Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan sarana produksi secara efektif, efisien dan ramah lingkungan
- 4) Memfasilitasi penggunaan dan penguasaan teknologi dan informasi dibidang pertanian
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk pertanian mengelola sistem usaha agribisnis yang baik guna meningkatkan pendapatan petani

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No.17 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas dibantu oleh;
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Bina Produksi dibantu oleh ;
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Padi,Palawija dan Hortikultura
 - b) Kepala Seksi Benih dan Paket Teknologi
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian

- 4) Kepala Bidang Agribisnis dan Agroindustri dibantu oleh;
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Agribisnis dan Pengawasan Peredaran Pupuk/Pestisida
 - b) Kepala Seksi Informasi Pasar dan Promosi Hasil Pertanian
 - c) Kepala Seksi Pengolahan, Pembinaan Mutu dan Penganekaragaman Hasil
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air dibantu oleh;
 - a) Kepala Seksi Pengelolaan Air
 - b) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan
 - c) Kepala Seksi Perluasan Areal / Kelembagaan Tani
- 6) Kepala Bidang Pengendalian OPT dibantu oleh;
 - a. Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan OPT
 - b. Kepala Seksi Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi
 - c. Kepala Seksi Iklim, Analisis dan Mitigasi Dampak Lingkungan
 - d. Kepala UPTD Kecamatan dibantu oleh;
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 7) Kepala UPTD Balai Benih dibantu oleh;
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

e. Data Pegawai

Pendataan pegawai lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas	1
2) Sekertariat	12
3) Bidang sarana Dan Prasarana	9
4) Bidang Tanaman Pangan	10
5) Bidang Hortikultura	10
6) Bidang Perkebunan	10

7) Bidang Perternakan, Perikanan Dan Kesehatan Hewan	10
Jumlah	<hr/> 62

f. Program Dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun

Dalam melaksanakan kinerja setiap tahunnya, Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun selalu mengacu pada Rencana Strategis. Rencana tersebut bertujuan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Adapun program dan kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - c) Penyediaan alat tulis kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
 - j) Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
 - d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- e) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - b) Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - 4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a) Penyusunan data base dan data ubinan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
 - c) Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
 - d) Pengembangan diversifikasi tanaman
 - e) Pengembangan pertanian pada lahan kering
 - f) Pengembangan Ekstensifikasi Tanaman Padi, Palawija
 - 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
 - b) Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
 - 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - a) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - b) Pendukung WISMP II
 - c) WISMP II LOAN
 - d) Pengembangan Jalan Pertanian
 - 7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pertanian
 - b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - c. Pengembangan Sumber-sumber Air
 - d. Pembangunan/Pemeliharaan Rutin Berkala/Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e. Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Hutang TA. 2015)

- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Penyusunan Rencana Strategis 2016-2020
- 9) Program pengembangan budidaya perikanan
 - a) Pengembangan kawasan budidaya air tawar
- 10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular pada ternak
- 11) Program peningkatan hasil peternakan
 - a) Pengembangan ternak sapi

2. Data Khusus

Dalam pengukuran kinerja sektor publik *value for money* merupakan variable utama dalam penelitian ini. *Value for money* adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Data yang diambil dari kantor Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah periode tahun 2015-2017. Laporan akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP disampaikan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berorientasi pada hasil.

B. Hasil Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode tahun 2015-2017 menggunakan tiga elemen yang diteliti yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen:

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \text{Target Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.⁵⁹

Berikut adalah kriteria kinerja sektor publik dikatakan ekonomis:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.⁶⁰

Tabel 4.1 Pengukuran Ekonomi tahun 2015

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Penghematan 2015	Tingkat Ekonomis
1. Program Pelayanan Administrasi	419.756.600,-	380.813.065,-	38.943.535,-	91

⁵⁹Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2015, h.280

⁶⁰Moh. Mahsun. *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2017), h. 186.

Perkantoran				
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.050.000,-	311.062.000,-	58.988.000,-	84
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,-	0,-	0,-	0
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.458.900,-	22.453.800	5.100,-	99
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	68.976.000,-	68.976.000,-	0,-	100
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	4.190.234.650 ;-	4.072.246.90 0,-	117.987.750; -	97
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	76.537.000,-	75.781.400,-	755.600,-	99
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	5.207.526.500 ;-	4.941.028.15 5,-	266.498.345; -	95
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	32.371.475.00 0,-	31.874.236.1 20,-	497.238.880; -	94
JUMLAH	42.414.729.65 0,-	41.492.650.4 56,-	922.079.194; -	97

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Ekonomi tahun 2015 yang ditunjukkan pada tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.38.943.535 dari realisasi anggaran sebesar Rp.380.813.065 dan pagu anggaran sebesar Rp.419.756.600. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 91% atau berada pada tingkat ekonomis.
- b) Pada poin 2 (dua) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.689.984. dari realisasi anggaran sebesar Rp.57.115.061 dan pagu anggaran sebesar Rp. 57.765.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis
- c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diketahui tidak ada keterangan apapun pada LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
- d) Pada poin 4 (empat) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.5.100 dari realisasi anggaran sebesar Rp.22.453.800 dan pagu anggaran sebesar Rp.2.458.900. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis
- e) Pada poin 5 (lima) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani diketahui tidak mengalami penghematan dikarenakan jumlah jumlah anggaran sama besar dengan jumlah realisasi. yakni sebesar Rp.68.976.000 maka tingkat ekonomis pada program tersebut sebesar 100% dan dinyatakan ekonomis berimbang.
- f) Pada poin 6 (enam) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.117.987.750 dari realisasi anggaran sebesar Rp.4.072.246.900 dan

pagu anggaran sebesar Rp.4.190.234.650. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 97% atau berada pada tingkat ekonomis.

- g) Pada poin 7 (tujuh) Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.755.600 dari realisasi anggaran sebesar Rp.75.781.400 dan pagu anggaran sebesar 76.537.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis
- h) Pada poin 8 (delapan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.266.498.345 dari realisasi anggaran sebesar Rp.4.941.028.155 dan pagu anggaran sebesar Rp.5.207.526.500. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 95% atau berada pada tingkat ekonomis.
- i) Pada poin 9 (Sembilan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.497.238.880 dari realisasi anggaran sebesar Rp.31.874.236.120 dan pagu anggran sebesar Rp.32.371.475.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2015 menunjukkan 94% atau berada pada tingkat ekonomis.

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.1 bahwa total penghematan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun memperoleh nilai total sebesar 97% dengan deskripsi total pagu anggaran penghematan sebesar Rp 922.079.194; dan total pagu anggaran sebesar Rp 42.414.729.650, dan total pagu realisasi sebesar Rp 41.492.650.456 dengan total persentase angka dengan jumlah 97%, sesuai kriteria kinerja sektor publik dari sisi ekonomi, maka angka 97% berada pada rentan kurang dari 100% ,sehingga program ini dikatakan dalam kategori ekonomis.

Berdasarkan tabel 4.1 maka keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dari sisi ekonomis tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Tingkat Ekonomis 2015

Tingkat Ekonomi	Program	%
Ekonomis	7	78
Ekonomis Berimbang	1	11
Tidak Ekonomis	0	0
Tanpa Keterangan	1	11
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.2 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten simalungun, 7 kegiatan masuk ke dalam kategori ekonomis dengan nilai persentase dibawah 100% yakni sebesar 78% . 1 kegiatan masuk ke dalam kategori ekonomis berimbang dengan nilai persentase sama dengan 100% yakni sebesar 11%. Dan 1 kegiatan masuk ke dalam kategori tanpa keterangan karna nilai persentase ekonomis tidak dijelaskan dalam tabel sehingga dijadikan pelengkap untuk memenuhi total persentase.

Tabel 4.3. Pengukuran ekonomi tahun 2016

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Penghematan 2016	Pengukuran Ekonomis
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	628.300.000 ,-	568.611.243,-	59.688.757,-	90
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.050.000 ,-	311.062.000,-	58.988.000,-	84
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	39.223.000, -	39.223.000,-	0	100

Capaian Kinerja dan Keuangan				
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	354.776.000 ,-	290.941.000,-	63.835.000,-	82
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.150.498.000,-	3.047.649.455,-	102.848.545	96
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	262.762.000 ,-	232.303.140,-	30.458.860,-	88
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.929.776.800,-	1.792.063.099,-	137.713.701; -	92
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.275.707.200,-	11.250.833.714,-	24.873.486,-	99
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.00,-	9.190.000,-	810.000,-	91
JUMLAH	18.021.093.000,-	17.541.876.651,-	479.216.349; -	97

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Ekonomi tahun 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.59.688.757 dari realisasi

anggaran sebesar Rp.568.611.234 dan pagu anggaran sebesar Rp.628.300.000 hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 90% atau berada pada tingkat ekonomis

- b) Pada poin 2 (dua) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diketahui mengalami penghematan Rp.58.988.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.311.062.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.370.050.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 84% atau berada pada tingkat ekonomis
- c) Pada poin 3 (tiga) program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diketahui tidak mengalami penghematan dikarenakan jumlah anggaran sama besar dengan jumlah realisasi, yakni sebesar Rp.39.223.000, maka tingkat ekonomis pada program tersebut sebesar 100% dan dinyatakan ekonomis berimbang.
- d) Pada poin 4 (empat) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.63.835.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.290.941.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.354.776.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 82% atau berada pada tingkat ekonomis
- e) Pada poin 5 (lima) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.102.848.545 dari realisasi anggaran sebesar Rp.3.047.649.455 dan pagu anggaran sebesar Rp.3.150.498.00. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 96% atau berada pada tingkat ekonomis.
- f) Pada poin 6 (enam) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan Rp.30.458.860 dari realisasi anggaran sebesar Rp.232.303.140 dan pagu anggaran sebesar Rp.262.762.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 91% atau berada pada tingkat ekonomis
- g) Pada poin 7 (tujuh) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.137.713.701 dari realisasi anggaran sebesar Rp.1.792.063.099 dan

pagu anggaran sebesar Rp.1.929.776.800. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 92% atau berada pada tingkat ekonomis.

- h) Pada poin 8 (delapan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.24.873.486 dari realisasi anggaran sebesar Rp.11.250.833.714 dan pagu anggaran sebesar Rp.11.275.707.200. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis.
- i) Pada poin 9 (Sembilan) Program Perencanaan Pembangunan Daerah diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.810.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.9.190.000 dan pagu anggaran Rp.10.000.000. hasil pengukuran ekonomis tahun 2016 menunjukkan 91% atau berada pada tingkat ekonomis.

Dari data Pengukuran Ekonomi tahun 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa total penghematan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun memperoleh nilai total sebesar 97% dengan deskripsi total pagu anggaran penghematan sebesar Rp 479.216.349, dan total pagu anggaran sebesar Rp 18.021.093.000, dan total pagu realisasi sebesar Rp 17.541.876.651, dengan total persentase angka dengan jumlah 97%, sesuai kriteria kinerja sektor publik dari sisi ekonomi, maka angka 97% berada pada rentan kurang dari 100% ,sehingga program ini dikatakan dalam kategori ekonomis.

Berdasarkan tabel 4.3 maka keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dari sisi ekonomis tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai berikut :

Gambar 4.4 Tingkat Ekonomis Tahun 2016

Tingkat Ekonomi	Program	%
Ekonomis	8	89
Ekonomis Berimbang	1	11
Tidak Ekonomis	0	0

Tanpa Keterangan	0	0
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.4 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten simalungun, 8 program masuk ke dalam kategori ekonomis dengan nilai persentase dibawah 100% yakni, sebesar 89%. 1 kegiatan masuk ke dalam kategori ekonomis berimbang dengan nilai persentase sama dengan 100% yakni sebesar 11%.

Tabel 4. 5. Pengukuran Ekonomi Tahun 2017

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Penghematan 2017	Pengukuran Ekonomis
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	543.500.000 ,-	536.734.717,-	6.775.283,-	98
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.225.600.0 00,-	1.148.322.71 8,-	77.277.186,-	93
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000, -	-	-	-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.017.000, -	48.587.000,-	484.00,-	99
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	437.035.800 ,-	436.628.400,-	407.400,-	99
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.532.642.2	3.510.480.00	22.144.200,-	99

Pertanian/Perkebunan	00,-	0		
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	284.298.000 ,-	256.433.000,-	28.165.000,-	90
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.768.266.0 00,-	1.717.093.12 7,-	51.178.873,-	97
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	18.431.449. 000,-	16.355.699,2 00,-	2.075.749.80 0,-	88
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100.000.000 ,-	99.900.000,-	100.000,-	99
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	235.996.000 ,-	232.996.000,-	3.030.000	98
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	1.434.497.0 00,-	646.693.000,-	787.786.000,-	45
JUMLAH	20.057.601. 000,-	24.989.567.2 58,-	3.068.033.74 2,-	89

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Ekonomi tahun 2017 yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.6.775.283 dari realisasi anggaran sebesar Rp.536.734.717 dan pagu anggaran sebesar Rp.543.500.000 hasil

- pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 98% atau berada pada tingkat ekonomis.
- b) Pada poin 2 (dua) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.77.277.186 dari realisasi anggaran sebesar Rp.1.148.322.718 dan pagu anggaran sebesar Rp.1.225.600.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 93% atau berada pada tingkat ekonomis.
 - c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diketahui hanya memiliki anggaran tetapi tidak ada realisasi dari anggaran tersebut.
 - d) Pada poin 4 (empat) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.484.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.48.587.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.49.017.000 Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis.
 - e) Pada poin 5 (lima) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.407.400 dari realisasi anggaran sebesar Rp.436.628.400 dan pagu anggaran sebesar Rp.437.035.800. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis.
 - f) Pada poin 6 (enam) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.22.144.200 dari realisasi anggaran sebesar Rp.3.510.480.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.3.532.642.200. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis.
 - g) Pada poin 7 (tujuh) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.28.165.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.256.433.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.284.298.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 90% atau berada pada tingkat ekonomis

- h) Pada poin 8 (delapan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.51.178.873 dari realisasi anggaran sebesar Rp.1.171.093.127 dan pagu anggaran sebesar Rp.1.768.266.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 97% atau berada pada tingkat ekonomis.
- i) Pada poin 9 (Sembilan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.2.075.749.800 dari realisasi anggaran sebesar Rp.16.355.699.200 dan pagu anggaran sebesar Rp.18.431.449.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 88% atau berada pada tingkat ekonomis.
- j) Pada poin 10 (sepuluh) Program Pengembangan Budidaya Perikanan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.100.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.99.900.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 99% atau berada pada tingkat ekonomis.
- k) Pada poin 11 (sebelas) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.3.030.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.23.232.996.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.235.996.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 98% atau berada pada tingkat ekonomis
- l) Pada poin 12 (dua belas) Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan diketahui mengalami penghematan sebesar Rp.787.786.000 dari realisasi anggaran sebesar Rp.646.693.000 dan pagu anggaran sebesar Rp.1.434.497.000. Hasil pengukuran ekonomis tahun 2017 menunjukkan 45% atau berada pada tingkat ekonomis

Dari data Pengukuran Ekonomi tahun 2017 yang ditunjukkan pada tabel 4.5 diketahui bahwa total penghematan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun memperoleh nilai total sebesar 89% dengan deskripsi total pagu anggaran penghematan sebesar Rp 3.068.033.742, dan total pagu anggaran sebesar Rp 20.057.601.000, dan total pagu realisasi

sebesar Rp 24.989.567.258, dengan total persentase angka dengan jumlah 89%, sesuai kriteria kinerja sektor publik dari sisi ekonomi, maka angka 89% berada pada rentan kurang dari 100%, sehingga program ini dikatakan dalam kategori ekonomis.

Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan tabel 4.5 maka keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dari sisi ekonomis tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4.6 : Tingkatan Ekonomis Tahun 2017

Tingkat Ekonomi	Program	%
Ekonomis	11	92
Ekonomis Berimbang	0	0
Tidak Ekonomis	0	0
Tanpa Keterangan	1	8
Jumlah	12	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.6 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 12 program yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten simalungun, 11 program masuk ke dalam kategori ekonomis dengan nilai persentase dibawah 100% yakni sebesar 92%, dan 1 kegiatan masuk ke dalam kategori tanpa keterangan karna nilai persentase ekonomis tidak dijelaskan dalam tabel sehingga dijadikan pelengkap untuk memenuhi total persentase.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Merumuskan efisiensi sebagai berikut:⁶¹

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100$$

Keterangan:

Output : presentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Input : presentasi nilai ekonomi

Output merupakan hasil yang diperoleh dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Dalam penelitian yang dimaksud dengan *output* adalah presentase hasil yang diperoleh dari satu kegiatan. *Input* yang akan dibandingkan dengan *output* untuk menentukan tingkat efisiensi adalah presentase nilai ekonomi, yaitu hasil yang diperoleh atas perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran.⁶²

Berikut adalah kriteria kinerja sektor publik dikatakan efisien:⁶³

- d) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efisien
- e) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang
- f) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efisien

Tabel 4.7. Pengukuran efisiensi 2015

Program	<i>Input</i>	<i>Output</i>	Efisiensi 2015 %	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91	98	107	Efisien
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99	99	100	Efisien Berimbang

⁶¹Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h.80

⁶²*Ibid.*, h.81.

⁶³Moh Mahsun. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h.187.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99	99	100	Efisien Berimbang
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	100	100	Efisien Berimbang
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	97	97	100	Efisien Berimbang
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	99	99	100	Efisien Berimbang
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	95	95	100	Efisien Berimbang
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	94	94	100	Efisien Berimbang
JUMLAH	86	87	101	EFISIEN

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efisiensi tahun 2015 yang ditunjukkan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada Poin 1 (satu) diketahui program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami efisiensi sebesar 107% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai input sebesar 91%.
- b) Pada Poin 2 (dua) diketahui Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.

- c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada program ini tidak ada *output* maupun *input* yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
- d) Pada Poin 4 (empat) diketahui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.
- e) Pada Poin 5 (lima) diketahui Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 100%
- f) Pada Poin 6 (enam) diketahui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 97% dan nilai input sebesar 97%.
- g) Pada Poin 7 (tujuh) diketahui Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%
- h) Pada Poin 8 (delapan) diketahui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 95% dan nilai input sebesar 95%
- i) Pada Poin 9 (Sembilan) diketahui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 94% dan nilai input sebesar 94%.

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui angka efisiensi dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 101% dengan nilai output total sebesar 87% dan nilai input sebesar 86%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi, jika nilai angka berada pada rentan lebih besar dari 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efisien dinyatakan Efisien. Karena angka menunjukkan diatas 100%.

Berdasarkan tabel 4.7 terdapat 9 program dalam pengukuran efisien yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 yang terdiri dari:

Tabel 4.8. Tingkat efisiensi tahun 2015

Tingkat pengukuran	Program	%
Efisien	7	78
Efisien Berimbang	1	11
Tidak efisien	0	0
Tanpa keterangan	1	11
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.8 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten simalungun, 7 program masuk ke dalam kategori efisien dengan nilai persentase sebesar 78%. 1 kegiatan masuk ke dalam kategori efisien berimbang dengan nilai persentase sebesar 11%, dan 1 kegiatan masuk ke dalam kategori tanpa keterangan karna nilai persentase efisien tidak dijelaskan dalam tabel sehingga dijadikan pelengkap untuk memenuhi total persentase.

Tabel 4.9. Perhitungan Efisien Tahun 2016

Program	<i>Inpu t</i>	<i>Output</i>	Efisiensi 2016 %	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	98	108	Efisien
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84	100	119	Efisien
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	Efisien Berimbang

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	82	100	121	Efisien
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	96	100	104	Efisien
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	88	100	113	Efisien
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	92	100	108	Efisien
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	99	100	101	Efisien
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	91	100	109	Efisien
JUMLAH	97	99	102	Efisien

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efisiensi tahun 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada Poin 1 (satu) diketahui program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami efisiensi sebesar 108% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai input sebesar 90%.
- b) Pada Poin 2 (dua) diketahui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami efisiensi sebesar 119% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 84%.
- c) Pada Poin 3 (tiga) diketahui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 100%.
- d) Pada Poin 4 (empat) diketahui program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami efisiensi sebesar 121% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 82%.

- e) Pada Poin 5 (lima) diketahui program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi sebesar 104% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 96%.
- f) Pada Poin 6 (enam) diketahui program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi sebesar 113% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 88%.
- g) Pada Poin 7 (tujuh) diketahui program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi sebesar 108% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 92%.
- h) Pada Poin 8 (delapan) diketahui program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi sebesar 101% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 99%.
- i) Pada Poin 9 (Sembilan) diketahui program Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami efisiensi sebesar 109% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai input sebesar 91%.

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, angka efisiensi dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 102% dengan nilai output total sebesar 99 poin dan nilai input sebesar 97 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi, jika nilai angka berada pada rentan diatas 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efisien dinyatakan Efisien. Karena angka menunjukkan diatas 100%.

Berdasarkan tabel 4.9 terdapat 9 program dalam pengukuran efisien yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 yang terdiri dari:

Tabel 4.10 : Tingkat efisiensi tahun 2016

Tingkat Pengukuran	Program	%
Efisien	7	78
Efisien berimbang	2	22
Tidak efisien	0	0

Tanpa keterangan	0	0
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.10 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, 7 kegiatan masuk ke dalam kategori efisien dengan nilai persentase sebesar 78%. 2 kegiatan masuk ke dalam kategori efisien berimbang dengan nilai persentase sebesar 22%.

Tabel 4.11: Pengukuran Efisien Tahun 2017

Program	<i>Output</i>	<i>Input</i>	Efisiensi 2017 %	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98	98	100	Efisien Berimbang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93	93	100	Efisien Berimbang
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99	99	100	Efisien Berimbang
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	99	99	100	Efisien Berimbang
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	99	99	100	Efisien Berimbang

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	90	90	100	Efisien Berimbang
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	97	97	100	Efisien Berimbang
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	88	88	100	Efisien Berimbang
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	99	99	100	Efisien Berimbang
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	98	98	100	Efisien Berimbang
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	45	45	100	Efisien Berimbang
JUMLAH	89	89	100	Efisien Berimbang

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efisiensi tahun 2017 yang ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada Poin 1 (satu) diketahui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai input sebesar 98%
- b) Pada Poin 2 (dua) diketahui Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 93% dan nilai input sebesar 93%.

- c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada program ini tidak ada *output* maupun *input* yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
- d) Pada Poin 4 (empat) diketahui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.
- e) Pada Poin 5 (lima) diketahui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.
- f) Pada Poin 6 (enam) diketahui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.
- g) Pada Poin 7 (tujuh) diketahui Program Peningkatan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 90% dan nilai input sebesar 90%.
- h) Pada Poin 8 (delapan) diketahui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 97% dan nilai input sebesar 97%.
- i) Pada Poin 9 (Sembilan) diketahui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 88% dan nilai input sebesar 88%.
- j) Pada Poin 10 (sepuluh) diketahui Program Pengembangan Budidaya Perikanan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai input sebesar 99%.
- k) Pada Poin 11 (sebelas) diketahui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai input sebesar 98%.

- 1) Pada Poin 12 (dua belas) diketahui Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan mengalami efisiensi berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 45% dan nilai input sebesar 45%.

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, angka efisiensi dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 100% dengan nilai output total sebesar 89 poin dan nilai input sebesar 89 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efisiensi, jika nilai angka berada pada rentan sama dengan 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efisien dinyatakan Efisien berimbang. Karena angka menunjukkan sama dengan 100%.

Berdasarkan tabel 4. 11 terdapat 12 kegiatan dalam pengukuran efisien yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 yang terdiri dari:

Tabel 4.12 : Tingkat efisiensi tahun 2017

Tingkat efisiensi	Program	%
Efisien	11	92
Efisien Berimbang	0	0
Tidak efisien	0	0
Tanpa Keterangan	1	8
Jumlah	12	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.12 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 12 program yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten simalungun, 11 kegiatan masuk ke dalam kategori efisien dengan nilai persentase sebesar 92%. dan 1 kegiatan masuk ke dalam kategori tanpa keterangan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi secara matematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : presentase efisiensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

Output : presentasi hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan

Outcome merupakan presentase dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan output adalah hasil yang dicapai dari suatu program yang dilakukan oleh organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan efektivitas apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁴

Berikut adalah pengukuran kinerja sektor publik dikatakan efektif:⁶⁵

- d) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- e) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
- f) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Tabel 4.13 : Pengukuran efektivitas tahun 2015

Program	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	Efektivitas 2015 %	Keterangan
1. Program Pelayanan	107	98	109	Efektif

⁶⁴Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, h. 84.

⁶⁵Moh Mahsun. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*, h.187

Administrasi Perkantoran				
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	99	101	Efektif
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99	101	Efektif
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	100	100	Efektif Berimbang
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100	97	103	Efektif
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100	99	101	Efektif
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	77	130	Efektif
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100	94	106	Efektif
JUMLAH	93	93	100	Efektif Berimbang

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efektivitas tahun 2015 yang ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) program pelayanan administrasi perkantoran mengalami efektivitas sebesar 109% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai outcome sebesar 107%.
- b) Pada poin 2 (dua) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada program ini tidak ada *output* maupun *outcome* yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
- d) Pada poin 4 (empat) program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%
- e) Pada poin 5 (lima) program peningkatan kesejahteraan petani mengalami efektivitas berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 100%.
- f) Pada poin 6 (enam) program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 103% dengan nilai output sebesar 79% dan nilai outcome sebesar 100%.
- g) Pada poin 7 (tujuh) program peningkatan pemsaran hasil produksi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- h) Pada poin 8 (delapan) program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 130% dengan nilai output sebesar 77% dan nilai outcome sebesar 100%.
- i) Pada poin 9 (Sembilan) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 106% dengan nilai output sebesar 94% dan nilai outcome sebesar 100%.

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, angka efektivitas dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 100% dengan nilai output total sebesar 93 poin dan nilai outcome sebesar 93

poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efektivitas, jika nilai angka berada pada rentan sama dengan 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efektif dinyatakan Efektif berimbang. Karena angka menunjukkan sama dengan 100%.

Berdasarkan tabel 4.13 terdapat 9 program dalam pengukuran efektif yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 yang terdiri dari:

Tabel 4. 14 : Tingkat Efektivitas Tahun 2015

Tingkat efektivitas	Program	%
Efektif	7	78
Efektif Berimbang	1	11
Tidak Efektif	0	0
Tanpa Keterangan	1	11
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.14 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, 7 program masuk ke dalam kategori efektif dengan nilai persentase sebesar 78%. 1 program masuk ke dalam kategori efektif berimbang dengan nilai persentase sebesar 11%, 1 program masuk ke dalam kategori tanpa keterangan.

Tabel 4. 15 Pengukuran Efektivitas Tahun 2016

Program	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	Efektivitas 2016 %	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108	98	112	Efektif
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119	100	119	Efektif
3. Program Peningkatan	100	100	100	Efektif

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Berimbang
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	121	100	121	Efektif
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	104	100	104	Efektif
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	113	100	113	Efektif
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	108	100	108	Efektif
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	101	100	101	Efektif
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	109	100	109	Efektif
JUMLAH	102	99	103	Efektif

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efektivitas tahun 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) program pelayanan administrasi perkantoran mengalami efektivitas sebesar 112% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai outcome sebesar 108%.
- b) Pada poin 2 (dua) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami efektivitas sebesar 119% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 119%.
- c) Pada poin 3 (tiga) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan caaian kinerja dan keuangan mengalami efektivitas berimbang sebesar 100% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 100%.

- d) Pada poin 4 (empat) program peningkatan kesejahteraan petani mengalami efektivitas sebesar 121% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 121%.
- e) Pada poin 5 (lima) program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 104% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 104%.
- f) Pada poin 6 (enam) program peningkatan pemasaran hasil produksi mengalami efektivitas sebesar 113% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 113%.
- g) Pada poin 7 (tujuh) program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 108% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 108%.
- h) Pada poin 8 (delapan) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 101%.
- i) Pada poin 9 (sembilan) program perencanaan pembangunan daerah mengalami efektivitas sebesar 109% dengan nilai output sebesar 100% dan nilai outcome sebesar 109%.

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, angka efektivitas dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 103% dengan nilai output total sebesar 99 poin dan nilai outcome sebesar 102 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efektivitas, jika nilai angka berada pada rentan di atas 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efektif dinyatakan Efektif. Karena angka menunjukkan di atas 100%.

Berdasarkan tabel 4.15 terdapat 9 program dalam pengukuran efisien yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 yang terdiri dari:

Tabel 4.16. Tingkat efektivitas tahun 2016

Tingkat Pengukuran	Program	%
Efektif	8	89
Efektif berimbang	1	11
Tidak efektif	0	0
Tanpa keterangan	0	0
Jumlah	9	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.16 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 9 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, 8 program masuk ke dalam kategori efisien dengan nilai persentase sebesar 89%. dan 1 program masuk ke dalam kategori efisien Berimbang.

Tabel 4.17: Pengukuran Efektivitas tahun 2017

Program	<i>outcome</i>	<i>Output</i>	Efektivitas 2017 %	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	98	102	Efektif
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	93	107	Efektif
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99	101	Efektif

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	99	101	Efektif
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100	99	101	Efektif
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 1Pertanian/Perkebunan	100	90	111	Efektif
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	97	103	Efektif
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100	88	114	Efektif
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100	99	101	Efektif
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100	98	102	Efektif
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	100	45	222	Efektif
JUMLAH	100	89	112	Efektif

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.

Dari data Pengukuran Efektivitas tahun 2017 yang ditunjukkan pada tabel 4.17 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada poin 1 (satu) program pelayanan administrasi perkantoran mengalami efektivitas sebesar 102% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai outcome sebesar 100%.

- b) Pada poin 2 (dua) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami efektivitas sebesar 107% dengan nilai output sebesar 93% dan nilai outcome sebesar 100%.
- c) Pada poin 3 (tiga) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada program ini tidak ada *output* maupun *outcome* yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun.
- d) Pada poin 4 (empat) program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- e) Pada poin 5 (lima) program peningkatan kesejahteraan petani mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- f) Pada poin 6 (enam) program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- g) Pada poin 7 (tujuh) program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 111% dengan nilai output sebesar 90% dan nilai outcome sebesar 100%.
- h) Pada poin 8 (delapan) program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 103% dengan nilai output sebesar 97% dan nilai outcome sebesar 100%.
- i) Pada poin 9 (sembilan) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan mengalami efektivitas sebesar 114% dengan nilai output sebesar 88% dan nilai outcome sebesar 100%.
- j) Pada poin 10 (sepuluh) program pengembangan budidaya perikanan mengalami efektivitas sebesar 101% dengan nilai output sebesar 99% dan nilai outcome sebesar 100%.
- k) Pada poin 11 (sebelas) program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak mengalami efektivitas sebesar 102% dengan nilai output sebesar 98% dan nilai outcome sebesar 100%.

- 1) Pada poin 12 (dua belas) program peningkatan produksi hasil perternakan mengalami efektivitas sebesar 222% dengan nilai output sebesar 45% dan nilai outcome sebesar 100%.

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas, angka efektivitas dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun adalah sebesar 112% dengan nilai input total sebesar 89% dan nilai outcome sebesar 100 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan kriteria penilaian efektivitas, jika nilai angka berada pada diatas 100%, maka kinerja sektor publik dari segi efektif dinyatakan Efektif. Karena angka menunjukkan diatas 100%.

Berdasarkan tabel 4. 17 terdapat 12 program dalam pengukuran efektivitas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 yang terdiri dari:

Tabel 4.18 : Tingkat efektivitas 2017

Tingkat Efektivits	Program	%
Efektif	11	92
Efektif Berimbang	0	0
Tidak Efektif	0	0
Tanpa Keterangan	1	8
Jumlah	12	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 4.18 diatas dapat dideskripsikan bahwa dari total 12 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, 11 program masuk ke dalam kategori efektif dengan nilai persentase sebesar 92%. dan 1 kegiatan masuk ke dalam kategori tanpa keterangan.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa seluruh program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015

sampai dengan tahun 2017 dari sisi Ekonomi dinilai cukup ekonomi, yaitu pada tahun 2015 memiliki nilai ekonomis sebesar 97%, pada tahun 2016 memiliki nilai ekonomis sebesar 97%, pada tahun 2015 dan 2016 memiliki nilai ekonomis sama, dan pada tahun 2017 memiliki nilai ekonomis sebesar 89%. Artinya, pada tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal ini dikarenakan terlalu banyak dana yang dianggarkan akan tetapi tidak digunakan, atau digunakan tetapi tidak melakukan pembrosan. Misalnya pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang tidak terlaksana.

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dinilai dari sisi efisien masih dinyatakan memiliki nilai yang relatif, pada tahun 2015 dinyatakan efisien hal ini karena ada beberapa kinerja yang tidak efisien. Pada tahun 2016 pengukuran efisien dinyatakan sudah efisien, hal ini disebabkan tidak adanya kinerja pemerintah yang tidak efisien, hampir seluruh kinerja pemerintah efisien dan hanya beberapa kinerja pemerintah yang efisien berimbang. Pada tahun 2017 pengukuran efisiensi dinyatakan efisien berimbang, hal ini dapat dilihat pada gambar 11 bahwasannya seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah efektif berimbang.

Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dinyatakan relatif dikarenakan pada tahun 2015 jumlah rasio efektif dinyatakan efektif berimbang hal ini dikarenakan terdapat beberapa kinerja yang tidak efektif akan tetapi dapat tertutupi oleh kinerja yang efektif jadi dapat dinyatakan pada tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mencapai kinerja yang efektif. Pada tahun 2016 rasio efektivitas dinyatakan efektif hal ini dapat dilihat dari tabel perhitungan efektivitas bahwa kinerja-kinerja sektor publik sudah mencapai nilai efektif berimbang dan efektif. Pada tahun 2017 rasio efektivitas dinyatakan efektif hal ini juga dapat dilihat dari tabel perhitungan efektivitas pada tahun 2017, yang mana tabel tersebut menyatakan bahwa program/kinerja sektor publik mencapai rata-rata efektivitas.

Temuan ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Demi Aulia Arfan dengan judul skripsi “*Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Priode Tahun 2011-2012*” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada priode 2011-2012 ditinjau dari elemen ekonomis maka dinas pertanian daerah istimewa Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan programnya secara ekonomis, dari elemen efisien pada priode tahun 2011-2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh program secara efisien. Untuk elemen efektif penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurohman jurnal yang berjudul “*Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kibupaten/Kota Di Jawa Timur*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2008-2010 ditinjau dari elemen efektivitas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah mampu menyelenggarakan programnya secara efektif.

Hal ini sejalan dengan teori *Value For Money* Menurut Moh Mahsun kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan *value for money* berkaitan sangat erat terhadap kinerja sektor publik, yang mana didalamnya terdapat tiga elemen penting yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi yakni elemen ekonomi, elemen efisien, dan elemen efektivitas. Dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan pendekatan *value for money*, suatu organisasi dapat mengukur kemampuan kinerjanya dalam menjalankan kegiatan/program yang telah direncanakan. Dengan begitu dapat pula melihat tingkat ekonomi, efektif, dan efisien suatu organisasi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *Value For Money* yang di dalamnya terdapat rasio Ekonomi, Efien, dan Efektivitas terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Rasio Ekonomis, keseluruhan laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015, 2016 dan 2017 menunjukkan berada pada tingkat ekonomis dikarenakan keseluruhan dari persentase ekonomis berada pada angka persentase dibawah 100%. Sehingga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun telah menjalankan program pada tahun 2015-2017 secara ekonomis.
2. Pada Rasio Efisiensi, laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan tingkat efisiensinya untuk tahun 2015 dan tahun 2016 berada pada tingkat efisien dan pada tahun 2017 berada pada tingkat efisien berimbang.
3. Pada Rasio Efektivitas, laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada tahun 2015, 2016, dan 2017 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dikarenakan keseluruhan dari persentase efektivitas berada pada angka persentase diatas 100%.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun
 - a. Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam proses perencanaan anggaran sebaiknya mengevaluasi program pada periode sebelumnya, sehingga tidak terjadi selisih yang begitu besar antara rencana anggaran

dengan realisasi anggaran. Setiap program yang sudah dianggarkan hendaklah direalisasikan sesuai pengukuran kinerja dengan baik.

- b. Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun diharapkan lebih mengetahui praktek dari program/kegiatan yang dilaksanakan atau merencanakan kegiatan agar tidak terjadi kesalah pahaman antar dinas dengan petani.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengukur suatu kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan 3 elemen yaitu ekonomi, efektif, dan efisien, akan tetapi sebaiknya ditambah dengan elemen lainnya. Misalnya menggunakan elemen manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan *outcome* dapat menggunakan metode lain, misalnya menyebar angket kepada masyarakat agar agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi, sehingga nilai *outcome* lebih rill dimana hal tersebut tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Annisa, Dian. skripsi. *Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money*. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.2006
- Aulia Arfan, Demi, skripsi *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Priode Tahun 2011-2012* (Yogyakarta:Indonesia) 2014
- Ardila, Isna. Jurna, *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendektan Value For Money Pada Pengadilan Negri Tebing Tinggi*, (Medan: Indonesia), 2015
- Department Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Diponegoro. Bandung, 2010
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta. Rajawali Pers 2017
- Harahap, Isnaini *et.al. Hadis-Hadis Ekonomi*. Medan. Wal Asri Publishing, 2015
- Jusmaliani. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta. PT.Bumi Aksara, 2014
- Faisal Amir,mohammad. *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*, Jakarta. Mitra Wacana Media, 2015
- Ikhsan, Arfan dkk. *metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung. Cipta Pustaka, 2014
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metode Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010
- Kasmir. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada, 2016

- Kurrohman, Taufik. jurnal. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Value For Money Di Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jember.Indonesia, 2012
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.UPP STIM YKPN,2015
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Public*. Yogyakarta. penerbit Andi, 2009
- Mahsun, Muhammad. *Penilaian Kinerja Sector Publik*. Yogyakarta. BPFE, 2006
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2013
- Multitama. *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*. Jakarta. Zikrul Hakim, 2006
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitia*. Yogyakarta.Ar-Ruzz Media, 2011
- Prawirosentono Suyadi, et. *Kinerja Dan Motivasi Karyawan Yogyakarta*. BPFE, 2017
- Samsudin, Sadili. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006)
- Sujarweni, Wiratna. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2012
- Wibowo. *Manajemen Kinerja Edisi Keempat*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. cet 4, 2014
- Yusuf Hamali, Arif. *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Center For Academic Publishing Service, 2018

Internet

<https://indrasufian.wordpress.com/2009/01/26/lakip> diakses pada tanggal 20 april 2018

https://repository.usd.ac.id/6090/2/122114145_full. Diakses pada tanggal 21 Februari 2018

Pengukuran Ekonomi tahun 2015

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Penghematan 2015	Ting kat ekon omis
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	419.756.600,-	380.813.065,-	38.943.535,-	91
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.412.000,-	19.589.065,-	2.822.600,-	87
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000,-	3.490.000,-	10.000,-	98
• Penyediaan alat tulis kantor	22.398.400,-	22.398.400,-	0,-	100
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.850.000	3.850.000,-	0,-	100
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.130.000,-	2.130.000,-	0,-	100
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,-	0,-	0,-	0
• Penyediaan peralatan rumah tangga	1.991.000,-	1.991.000,-	0,-	100
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	75.700.000,-	75.589.265,-	110.735,-	99

daerah				
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	216.000.000;-	180.000.000;-	36.000.000;-	83
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	71.775.000;-	71.775.000;-	0;-	100
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.765.000;-	57.115.061;-	689.984;-	99
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.765.000;-	57.115.061;-	649.984;-	99
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0;-	0;-	0;-	0
• Pendidikan dan Pelatihan Formal	0;-	0;-	0;-	0
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.458.900;-	22.453.800	5.100;-	99
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22.458.900;-	22.453.800;-	5.100;-	99
14. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	68.976.000;-	68.976.000;-	0;-	100
• Peningkatan	68.976.000;-	68.976.000;-	0;-	100

kemampuan lembaga petani				
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	4.190.234.650 ;-	4.072.246.900;-	117.987.750;-	97
• Penyusunan database potensi produksi pangan	110.545.250;-	110.532.200	13.050;-	99
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	50.536.400;-	50.536.400;-	0;-	100
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	2.810.635.000 ;-	2.753.030.000;-	57.605.000;-	98
• Pengembangan diversifikasi tanaman	60.150.000;-	59.929.300;-	220.700;-	99
• Pengembangan pertanian pada lahan kering	339.500.000;-	339.242.000;-	258.000;-	99
• Pengembangan Pembenuhan/Pembibitan	537.618.000;-	482.462.000;-	55.156.000;-	90
• Sosialisasi dan Perencanaan ketahanan pangan	281.250.000;-	276.512.000;-	4.738.000;-	98
16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	73.537.000;-	75.781.400;-	755.600;-	99
• Promosi atas hasil produksi	60.506.000;-	69.750.400;-	755.600;-	99

pertanian/perkebunan unggulan daerah				
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	16.031.000;-	16.031.000;-	0;-	100
17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	5.207.526.500 ;-	4.941.028.155;-	266.498.345;-	95
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.081.668.500 ;-	1.081.531.500;-	137.000;-	99
• Pendampingan APBD pendukung DAK	220.210.000;-	218.853.000;-	1.357.000;-	99
• Pendukung WISMP II	92.417.000	19.278.000;-	73.139.000;-	21
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pengolahan lahan	3.409.270.000 ;-	3.350.187.355;-	59.082.645;-	98
• WISMP II (LOAN)	403.361.000;-	271.178.300;-	132.782.700;-	67
18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	32.371.475.00 0;-	31.874.236.120; -	497.238.880;-	94
• Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	90.025.000;-	89.637.000;-	388.000;-	100
• Peningkatan	1.938550.000;	1.489.707.000;-	448.843.000;-	77

infrastruktur jalan pertanian	-			
• Peningkatan infrastruktur jalan pertanian (BKP)	10.000.000.00 0	9.955.840.500;-	44.159.500;-	100
• Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	20.342.900.00 0;-	20.339.051.620; -	3.848.380;-	100
JUMLAH	42.414.729.65 0;-	41.492.650.456; -	922.079.194;-	97

Pengukuran Ekonomi Tahun 2016

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Penghematan n 2016	Pengukuran ekonomis
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	628.300.000,-	568.611.243,	59.688.757,-	90
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88.000.000,-	42.079.552,-	45.926.448,-	48
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,-	4.640.000,-	360.000,-	93
• Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,-	19.895.000,-	105.000,-	99
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,-	9.988.540,-	11.460,-	99
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	0	100
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.000.000,-	63.350.000,-	11.650.000,-	84
• Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,-	4.980.000,-	20.000,-	99
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.275.000,-	108.688.151,	586.849,-	99
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	192.000.000,-	192.000.000,	0	100
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	119.025.000,-	117.900.000,	1.125.000,-	99
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	370.050.000,-	311.062.000,	58.988.000,-	84

Aparatur				
• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	96.000.000,-	91.412.000,-	4.588.000,-	95
• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	120.250.000,-	116.650.000, -	3.600.000,-	97
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	153.800.000,-	103.000.000, -	50.800.000,-	66
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.223.000,-	39.223.000,-	0	100
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39.223.000,-	39.223.000,-	0	100
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	354.776.000,-	290.941.000, -	63.835.000,-	82
• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	145.584.000,-	143.384.000, -	2.200.000,-	98
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	209.192.000,-	147.557.000, -	61.635.000,-	70
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.150.498.000,-	3.047.649.45 5,-	102.848.545	96
• Penyusunan database potensi produksi pangan	141.712.000,-	141.040.000, -	672.000,-	99
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	138.563.000,-	124.605.000, -	13.958.000,-	89
• Pengembangan intensifikasi	788.825.000,-	707.475.000,	81.350.000,-	89

tanaman padi, palawija		-		
• Pengembangan diversifikasi tanaman	170.273.000,-	170.233.000,	40.000	99
• Pengembangan pertanian pada lahan kering	572.125.000,-	571.796.455,	328.545,-	99
• Pengembangan Ekstensifikasi Tanaman Padi, Palawija	1.339.000.000,-	1.332.500.000,-	6.500.000,-	99
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	262.762.000,-	232.303.140,	30.458.860,-	88
• Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	211.541.000,-	185.537.140,	29.003.860,-	87
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	51.221.000,-	46.766.000,-	4.455.000,-	91
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.929.776.800,-	1.792.063.099,-	137.713.701;	92
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	645.832.000,-	645.619.000,	213.000,-	99
• Pendukung WISMP II	180.000.000,-	136.817.204,	43.182.796,-	76
• WISMP II (LOAN)	588.500.000,-	494.665.895,	93.834.105,-	84

• Pengembangan Jalan Pertanian	515.444.800,-	514.961.000, -	483.800;-	99
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.275.707.200,-	11.250.833.7 14,-	24.873.486;-	99
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	5.233.707.200,-	5.233.450.11 2,-	257.088;-	99
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	930.000.000,-	929.799.900, -	200.100;-	99
• Pengembangan Sumber-sumber Air	3.984.555.200,-	3.984.502.20 2,-	52.998	99
• Pembangunan/Pemeliharaan Rutin Berkala/Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Horti	678.604.000,-	654.238.500, -	24.365.500;-	96
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian (hutang TA. 2015)	448.843.000,-	448.843.000, -	0	100
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.00,-	9.190.000,-	810.000,-	91
• Penyusunan Rencana Strategis 2016-2020	10.000.000,-	9.190.000,-	810.000;-	91
JUMLAH	18.021.093.000,-	17.541.876.6 51,-	479.216.349; -	97

Pengukuran ekonomi tahun 2017

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	PENGHEMAT AN 2017	%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	543.500.000,-	536.734.717,-	6.775.283,-	98
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.500.000,-	55.346.999,-	2.153.001,-	96
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	100
• Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-	100
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,-	4.999.000,-	1.000,-	99
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,-	26.260.000,-	3.740.000,-	87
• Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,-	4.995.000,-	5.000,-	99
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,-	174.348.718,-	651.282,-	99
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	96.000.000,-	96.000.000,-	0,-	100
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	150.000.000,-	149.775.000,-	225.000,-	99
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.225.600.000 ,-	1.148.322.718 ,-	77.277.186,-	93
• Pengadaan mabeleur	235.000.000,-	227.544.500,-	7.455.500,-	96

• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	250.000.000,-	246.070.000,-	3.930.000,-	98
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	138.600.000,-	72.764.314,-	65.835.686,-	52
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas, balai benih dan kantor induk	602.000.000,-	601.944.000,-	56.000,-	99
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,-	-	-	-
• Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,-	-	-	-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.017.000,-	48.587.000,-	484.00,-	99
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	49.017.000,-	48.587.000,-	484.000,-	99
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	437.035.800,-	436.628.400,-	407.400,-	99
• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	149.634.800,-	149.417.400,-	217.400,-	99
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	287.401.000,-	287.211.000,-	190.000,-	99
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.532.642.200,-	3.510.480.000	22.144.200,-	99
• Penyusunan database potensi produksi pangan	114.458.000,-	114.278.000,-	270.000,-	99

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	145.729.200,-	125.282.000,-	20.447.200,-	85
• Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	199.204.000,-	199.104.000,-	100.000,-	99
• Pengembangan diversifikasi tanaman	22.060.000,-	22.010.000,-	50.000,-	99
• Pengembangan ekstensifikasi tanaman padi	1.400.101.000 ,-	1.398.806.000 ,-	1.295.000,-	99
• Pengembangan sentra pelayanan pertanian padi terpadu	1.651.000.000 ,-	1.651.000.000 ,-	0,-	100
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	284.298.000,-	256.433.000,-	28.165.000,-	90
• Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	39.366.000,-	37.871.000,-	1.945.000,-	96
• Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	70.954.000,-	60.030.000,-	10.924.000,-	84
• Promosi atas hasil produksi hortikultura unggulan daerah	92.139.000,-	88.750.000,-	3.389.000,-	96
• Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggulan daerah	82.139.000,-	69.792.000,-	12.347.000,-	86
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.768.266.000 ,-	1.717.093.127 ,-	51.178.873,-	97
• Pendukung WISMP II	65.000.000,-	64.942.580,-	57.420,-	99

• WISMP II (DANA LOAN HIBAH)	68.000.000,-	64.578.287,-	3.421.713,-	94
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Hortikultural Purba	560.386.000,-	546.725.860,-	13.660.140,-	97
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih tanaman pangan Jawa Tengah	152.633.000,-	149.776.000,-	2.827.000,-	98
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi padakebun induk perkebunan	254.000.000,-	253.959.800,-	40.200,-	99
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan Rambung Merah	161.151.500,-	157.273.300,-	13.878.200,-	91
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan Hatonduhan	161.214.000,-	160.602.300,-	612.200,-	99
• Pembibitan kopi arabika	172.068.000,-	156.012.000,-	16.056.000,-	90
• Pembuatan pupuk bokasi plus	173.813.000,-	173.223.000,-	590.000,-	99
9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	18.431.449.000,-	16.355.699,200,-	2.075.749.800,-	88
• Peningkatan/pengembangan jaringan irigasi tersier pertanian	587.369.000,-	586.888.000,-	481.000,-	99

• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	6.615.628.000 ,-	6.068.758.200 ,-	546.869.800,-	91
• Pengembangan/peningkatan jalan pertanian	2.613.080.000 ,-	2.612.960.000 ,-	120.000,-	99
• Pengembangan Sumber-sumber Air	4.333.000.000 ,-	4.332.854.600 ,-	145.400,-	99
• Pengembangan jaringan irigasi tersier/kwarter	2.782.372.000 ,-	2.745.600.000	36.772.000,-	98
• Pengembangan jalan pertanian mendukung tanaman perkebunan	1.500.000.000 ,-	8.638.400,-	1.491.361.600,-	0,58
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100.000.000,-	99.900.000,-	100.000,-	99
• Pengembangan kawasan budidaya air tawar	100.000.000,-	99.900.000,-	100.000,-	99
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	235.996.000,-	232.996.000,-	3.030.000	98
• Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	235,996.000,-	232.996.000,-	3.030.000,-	98
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	1.434.497.000 ,-	646.693.000,-	787.786.000,-	45
• Pengembangan ternak sapi	1.434.497.000 ,-	646.693.000,-	787.786.000,-	45
JUMLAH	20.057.601.00 0,-	24.989.567.25 8,-	3.068.033.742,-	89

Pengukuran Efisiensi 2015

Program/Kegiatan	Input	output	Efisiensi 2015 %	Keterangan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91	98	107	Efisien
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87	100	114	Efisien
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	98	100	102	Efisien
• Penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	100	0	Tidak Efisien
• Penyediaan peralatan rumah tangga	100	100	100	Efisien Berimbang
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	83	83	100	Efisien Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100	100	100	Efisien Berimbang
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99	99	100	Efisien Berimbang

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99	99	100	Efisien Berimbang
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	-
• Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	-
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99	99	100	Efisien Berimbang
14. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	100	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	100	100	100	Efisien Berimbang
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	97	97	100	Efisien Berimbang
• Penyusunan database potensi produksi pangan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	100	100	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	98	98	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan diversifikasi tanaman	99	99	100	Efisien Berimbang

• Pengembangan pertanian pada lahan kering	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan Pembenuhan/Pembibitan	90	90	100	Efisien Berimbang
• Sosialisasi dan Perencanaan ketahanan pangan	98	98	100	Efisien Berimbang
16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	99	100	101	Efisien
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	100	98	98	Tidak Efisien
17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	95	95	100	Efisien Berimbang
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pendampingan APBD pendukung DAK	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pendukung WISMP II	21	21	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pengolahan lahan	98	98	100	Efisien Berimbang

• WISMP II (LOAN)	67	67	100	Efisien Berimbang
18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	94	94	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	100	100	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan infrastruktur jalan pertanian	77	77	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan infrastruktur jalan pertanian (BKP)	100	100	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	100	100	100	Efisien Berimbang
JUMLAH	86	87	101	EFISIEN

Perhitungan Efisien Tahun 2016

Program/Kegiatan	Input	Output	Tingkat Efisiensi %	Keterangan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	98	108	Efisien
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	87	181	Efisien
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	93	99	106	Efisien
• Penyediaan alat tulis kantor	99	100	101	Efisien
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99	100	101	Efisien
• Penyediaan komponen instalasi	100	100	100	Efisien

listrik/penerangan bangunan kantor				Berimbang
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84	100	119	Efisien
• Penyediaan peralatan rumah tangga	99	100	101	Efisien
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99	100	101	Efisien
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	100	100	Efisien Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	99	100	101	Efisien
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84	100	119	Efisien
• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	95	100	105	Efisien
• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	97	100	103	Efisien
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	66	100	151	Efisien
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	100	Efisien Berimbang
13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	82	100	121	Efisien

• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	98	100	102	Efisien
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	70	100	142	Efisien
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	96	100	104	Efisien
• Penyusunan database potensi produksi pangan	99	100	101	Efisien
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	89	100	112	Efisien
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	89	100	112	Efisien
• Pengembangan diversifikasi tanaman	99	100	101	Efisien
• Pengembangan pertanian pada lahan kering	99	100	101	Efisien
• Pengembangan Ekstensifikasi Tanaman Padi, Palawija	99	100	101	Efisien
15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	88	100	113	Efisien
• Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	87	100	114	Efisien
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	91	100	109	Efisien

16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	92	100	108	Efisien
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	99	100	101	Efisien
• Pendukung WISMP II	76	100	131	Efisien
• WISMP II (LOAN)	84	100	119	Efisien
• Pengembangan Jalan Pertanian	99	100	101	Efisien
17. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	99	100	101	Efisien
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	99	100	101	Efisien
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	99	100	101	Efisien
• Pengembangan Sumber-sumber Air	99	100	101	Efisien
• Pembangunan/Pemeliharaan Rutin Berkala/Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Horti	96	100	104	Efisien
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian (hutang TA. 2015)	100	100	100	Efisien Berimbang
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	91	100	109	Efisien
• Penyusunan Rencana Strategis 2016-2020	91	100	109	Efisien
JUMLAH	97	99	102	Efisien

Pengukuran Efisien Tahun 2017

Program/Kegiatan	Output	Input	Efisiensi 2017 %	Tingkat Efisien
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98	98	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96	96	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	87	87	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan peralatan rumah tangga	99	99	100	Efisien Berimbang
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	100	100	Efisien Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	99	99	100	Efisien Berimbang
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	93	93	100	Efisien

Aparatur				Berimbang
• Pengadaan mabeleur	96	96	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	98	98	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	52	52	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas, balai benih dan kantor induk	99	99	100	Efisien Berimbang
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	
• Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99	99	100	Efisien Berimbang
17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	99	99	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan kemampuan	99	99	100	Efisien

lembaga petani				Berimbang
18. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Penyusunan database potensi produksi pangan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	85	85	100	Efisien Berimbang
• Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan diversifikasi tanaman	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan ekstensifikasi tanaman padi	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan sentra pelayanan pertanian padi terpadu	100	100	100	Efisien Berimbang
19. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	90	90	100	Efisien Berimbang
• Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	96	96	100	Efisien Berimbang
• Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	84	84	100	Efisien Berimbang
• Promosi atas hasil produksi hortikultura unggulan daerah	96	96	100	Efisien

				Berimbang
• Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggulan daerah	86	86	100	Efisien Berimbang
20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	97	97	100	Efisien Berimbang
• Pendukung WISMP II	99	99	100	Efisien Berimbang
• WISMP II (DANA LOAN HIBAH)	94	94	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Hortikultural Purba	97	97	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih tanaman pangan Jawa Tengah	98	98	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi padakebun induk perkebunan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan Rambung Merah	91	91	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan	99	99	100	Efisien Berimbang

Hatonduhan				
• Pembibitan kopi arabika	90	90	100	Efisien Berimbang
• Pembuatan pupuk bokasi plus	99	99	100	Efisien Berimbang
21. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	88	88	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan/pengembangan jaringan irigasi tersier pertanian	99	99	100	Efisien Berimbang
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	91	91	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan/peningkatan jalan pertanian	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan Sumber-sumber Air	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan jaringan irigasi tersier/kwarter	98	98	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan jalan pertanian mendukung tanaman perkebunan	0,58	0,58	100	Efisien Berimbang
22. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	99	99	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan kawasan budidaya air tawar	99	99	100	Efisien Berimbang

23. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	98	98	100	Efisien Berimbang
• Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	98	98	100	Efisien Berimbang
24. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	45	45	100	Efisien Berimbang
• Pengembangan ternak sapi	45	45	100	Efisien Berimbang
JUMLAH	89	89	100	Efisien Berimbang

Pengukuran efektivitas tahun 2015

Program/Kegiatan	Outcome	Output	efektivitas	Tingkat Efektif
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107	98	109	Efektif
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114	100	114	Efektif
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	102	100	102	Efektif
• Penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	Efektif Berimbang
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	Efektif Berimbang
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	100	100	100	Efektif Berimbang

bangunan kantor				
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	100	0	Tidak Efektif
• Penyediaan peralatan rumah tangga	100	100	100	Efektif Berimbang
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	99	101	Efektif
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	83	120	Efektif Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100	100	100	Efektif
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	99	101	Efektif
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	99	101	Efektif
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	-
• Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	-
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99	101	Efektif
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	99	101	Efektif
14. Program Peningkatan	100	100	100	Efektif

Kesejahteraan Petani				Berimbang
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	100	100	100	Efektif Berimbang
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100	97	103	Efektif
• Penyusunan database potensi produksi pangan	100	99	101	Efektif
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	100	100	100	Efektif Berimbang
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	100	98	102	Efektif
• Pengembangan diversifikasi tanaman	100	99	101	Efektif
• Pengembangan pertanian pada lahan kering	100	99	101	Efektif
• Pengembangan Pembenihan/Pembibitan	100	90	101	Efektif
• Sosialisasi dan Perencanaan ketahanan pangan	100	98	102	Efektif
16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100	99	101	Efektif
• Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	101	100	100	Efektif Berimbang
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan	98	98	100	Efektif Berimbang

masyarakat				
17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	77	130	Efektif
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	100	99	101	Efektif
• Pendampingan APBD pendukung DAK	100	99	101	Efektif
• Pendukung WISMP II	100	21	476	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pengolahan lahan	100	98	102	Efektif
• WISMP II (LOAN)	100	67	149	Efektif
18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100	94	106	Efektif
• Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	100	100	100	Efektif
• Peningkatan infrastruktur jalan pertanian	100	77	130	Efektif
• Peningkatan infrastruktur jalan pertanian (BKP)	100	100	100	Efektif Berimbang
• Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	100	100	100	Efektif Berimbang
JUMLAH	93	93	100	Efektif Berimbang

Pengukuran Efisiensi Tahun 2016

Program/Kegiatan	target	Capaian kinerja	Efektivitas 2016	Tingkat Efektivitas
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108	98	112	Efektif
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	181	87	108	Eektif
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	106	99	107	Efektif
• Penyediaan alat tulis kantor	101	100	101	Efektif
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101	100	101	Efektif
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	100	Efektif Berimbang
• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119	100	119	Efektif
• Penyediaan peralatan rumah tangga	101	100	101	Efektif
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101	100	101	Efektif
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	100	100	Efektif Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	101	100	101	Efektif
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119	100	119	Efektif

• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	105	100	105	Efektif
• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	103	100	103	Efektif
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	151	100	151	Efektif
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	Efektif Berimbang
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	100	Efektif Berimbang
13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	121	100	121	Efektif
• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	102	100	102	Efektif
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	142	100	142	Efektif
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	104	100	104	Efektif
• Penyusunan database potensi produksi pangan	101	100	101	Efektif
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	112	100	112	Efektif
• Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	112	100	112	Efektif
• Pengembangan diversifikasi	101	100	101	Efektif

tanaman				
• Pengembangan pertanian pada lahan kering	101	100	101	Efektif
• Pengembangan Ekstensifikasi Tanaman Padi, Palawija	101	100	101	Efektif
15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	113	100	113	Efektif
• Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	114	100	114	Efektif
• Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	109	100	109	Efektif
16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	108	100	108	Efektif
• Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	101	100	101	Efektif
• Pendukung WISMP II	131	100	131	Efektif
• WISMP II (LOAN)	119	100	119	Efektif
• Pengembangan Jalan Pertanian	101	100	101	Efektif
17. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	101	100	101	Efektif
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	101	100	101	Efektif

• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	101	100	101	Efektif
• Pengembangan Sumber-sumber Air	101	100	101	Efektif
• Pembangunan/Pemeliharaan Rutin Berkala/Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Horti	104	100	104	Efektif Bimbang
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian (hutang TA. 2015)	100	100	100	Efektif berimbang
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	109	100	109	Efektif
• Penyusunan Rencana Strategis 2016-2020	109	100	109	Efektif
JUMLAH	102	99	103	Efektif

Pengukuran Efektivitas tahun 2017

Program/Kegiatan	Target	Capaian kinerja	Efektivitas %	Tingkat Efektivitas
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	98	102	Efektif
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	96	104	Efektif
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100	100	100	Efektif Berimbang
• Penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	Efektif Berimbang

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	99	101	Efektif
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	87	115	Efektif
• Penyediaan peralatan rumah tangga	100	99	101	Efektif
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	99	101	Efektif
• Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	100	100	Efektif Berimbang
• Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100	99	101	Efektif
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	93	107	Efektif
• Pengadaan mabeleur	100	96	104	Efektif
• Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100	98	102	Efektif
• Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100	52	192	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas, balai benih dan kantor induk	100	99	101	Efektif
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
• Pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-

formal				
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99	101	Efektif
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	99	101	Efektif
17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	99	101	Efektif
• Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	100	99	101	Efektif
• Peningkatan kemampuan lembaga petani	100	99	101	Efektif
18. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100	99	101	Efektif
• Penyusunan database potensi produksi pangan	100	99	101	Efektif
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	100	85	1118	Efektif
• Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	100	99	101	Efektif
• Pengembangan diversifikasi tanaman	100	99	101	Efektif
• Pengembangan ekstensifikasi tanaman padi	100	99	101	Efektif
• Pengembangan sentra pelayanan pertanian padi	100	100	100	Efektif

terpadu				Berimbang
19. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 1Pertanian/Perkebunan	100	90	111	Efektif
• Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	100	96	104	Efektif
• Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	100	84	119	Efektif
• Promosi atas hasil produksi hortikultura unggulan daerah	100	96	104	Efektif
• Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggulan daerah	100	86	116	Efektif
20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	97	103	Efektif
• Pendukung WISMP II	100	99	101	Efektif
• WISMP II (DANA LOAN HIBAH)	100	94	106	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Hortikultural Purba	100	97	103	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih tanaman pangan Jawa Tengah	100	98	102	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi	100	99	101	Efektif

padakebun induk perkebunan				
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan Rambung Merah	100	91	109	Efektif
• Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada balai benih Ikan Hatonduhan	100	99	101	Efektif
• Pembibitan kopi arabika	100	90	111	Efektif
• Pembuatan pupuk bokasi plus	100	99	101	Efektif
21. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100	88	114	Efektif
• Peningkatan/pengembangan jaringan irigasi tersier pertanian	100	99	101	Efektif
• Peningkatan Infrastruktur Pertanian	100	91	109	Efektif
• Pengembangan/peningkatan jalan pertanian	100	99	101	Efektif
• Pengembangan Sumber-sumber Air	100	99	101	Efektif
• Pengembangan jaringan irigasi tersier/kwarter	100	98	102	Efektif
• Pengembangan jalan pertanian mendukung tanaman perkebunan	100	0,58	172	Efektif

22. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100	99	101	Efektif
• Pengembangan kawasan budidaya air tawar	100	99	101	Efektif
23. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100	98	102	Efektif
• Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	100	98	102	Efektif
24. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	100	45	222	Efektif
• Pengembangan ternak sapi	100	45	222	Efektif
JUMLAH	100	89	112	Efektif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah **TRINIYATI** lahir di Sei Lapan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 1997, merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara putri dari pasangan Bapak Katiok dan Ibu Suyatmi. Penulis berkebangsaan Indonesia, Suku Jawa dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di jalan Rambungan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SD Negeri 056596 Tanjung Baru. Pada tahun 2011 lulus dari MTs Muhammadiyah Kwala Madu Langkat. Dan Pada tahun 2014 lulus dari MAS Muhammdiyah Kwala Madu Kabupaten LANGKAT. Lalu kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Islam dengan konsentrasi Ekonomi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tanggal 19 Oktober 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dengan pendekatan *Value For Money* Periode Tahun 2015-2017**”.